



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

**LAPORAN TAHUNAN 2013**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**



# Kata Pengantar

---

Assalamu'alaikum Warrah Matullahi Wabarakatuh

Laporan Tahunan 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun ini disusun sebagai wujud ikhtisar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kami dalam berbagai kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan, maupun kendala yang dihadapi selama proses berjalan. Laporan ini juga sebagai wujud transparansi yang kami sampaikan dengan menunjukkan kinerja Badan Litbang SDM yang dapat dicapai selama tahun anggaran 2013.

Laporan Tahunan 2013 ini bersifat komprehensif dan dibagi ke dalam 4 bagian yaitu Bagian pertama Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang Badan Litbang SDM yang terdiri dari profil, tugas dan fungsi, visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja, dan struktur organisasi. Bagian kedua berisi tentang rencana strategis di tahun 2013. Bagian ketiga merupakan inti kegiatan yang kami lakukan selama tahun 2013 yaitu berisi tentang ikhtisar atau highlight kegiatan kami di 2013 yaitu Penelitian, Pemanfaatan Karya Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; selain itu kami juga menyertakan permasalahan yang terjadi di tahun 2013. Pada bagian terakhir berisi penutup yang merupakan kesimpulan dan rangkuman keseluruhan laporan tahunan ini.

Melalui Laporan Tahunan 2013 ini diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran kinerja Badan Litbang SDM telah dicapai selama setahun secara transparan, serta menjadi panduan dalam meningkatkan kinerja setiap pegawai Badan Litbang SDM.

## KATA PENGANTAR

Akhir kata, selaku Kepala Badan, kami menyampaikan terimakasih kepada para stakeholders, pejabat dan seluruh staf di lingkungan Badan Litbang SDM yang dapat mewujudkan kinerja sangat baik selama 2013 sebagai dedikasi membawa kemajuan pada tahun 2013. Semoga Badan Litbang SDM mampu berkarya lebih baik ditahun-tahun mendatang.

Jakarta, Maret 2014

Kepala Badan



Basuki Yusuf Iskandar

# DAFTAR ISI

---

Bab I Pendahuluan .....	8
Bab II Ikhtisar Kegiatan 2013 .....	26
Bab III Penutup .....	78
Lampiran-Lampiran .....	80
Personil .....	81
Kontak .....	82

## Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran Strategis Badan Litbang SDM .....	12
Tabel 2 Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM per 31 Desember 2013 .....	21
Tabel 3 Indikator Kinerja Badan Litbang Tahun 2013-Sasaran Strategis 1 .....	26
Tabel 4 Daftar Publikasi dan Terbitan Badan Litbang SDM Tahun 2013 .....	61
Tabel 5 Indikator Kinerja Badan Litbang Tahun 2013-Sasaran Strategis 2 .....	65
Tabel 6 Permasalahan dan Tindak Lanjut .....	74

**Daftar Bagan**

Gambar 1 Komposisi PNS Badan Litbang SDM dengan Jabatan Tertentu .....	18
Gambar 2 Laman Situs Badan Litbang SDM <a href="http://www.balitbang.kominfo.go.id">www.balitbang.kominfo.go.id</a> .....	23
Gambar 3 Akses TIK Rumah Tangga Indonesia dan Sebarannya .....	28
Gambar 4 Pre-Departure Briefing Beasiswa S2 Luar Negeri .....	66
Gambar 5 Bimtek dan Sertifikasi GCIO di Purwokerto (atas) dan Mataram (bawah) .....	67
Gambar 6 Bimtek Budaya Dokumentasi .....	68
Gambar 7 Kominfo Goes to Mall Malang 2013 .....	69
Gambar 8 BPRTIK Ciputat dan Kegiatan Pelatihan .....	50







# Bab I

## Pendahuluan

"Badan Litbang SDM  
dibentuk berdasarkan  
pasal 4 Peraturan  
Menteri Komunikasi  
dan Informatika Nomor:  
17/PER/M.Kominfo/10/2010  
tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Kementerian  
Komunikasi dan Informatika"

# Bab I Pendahuluan

---

## Profil

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disingkat dengan Badan Litbang SDM merupakan salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Badan Litbang SDM merupakan unsur penunjang Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki 2 (dua) peran penting yaitu pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika dan pelaksanaan pengembangan SDM bidang komunikasi dan Informatika. Peran Badan Litbang SDM tersebut dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Litbang SDM baik yang ada di pusat maupun di daerah.

## Tugas dan Fungsi

Tugas Badan Litbang SDM sebagaimana dalam pasal 626 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika; sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

*seminar kecil III studi kontraktual*



### Visi

"Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika yang produktif dan terpercaya serta Sumber Daya Manusia yang profesional dalam membangun masyarakat informasi"

### Misi

Visi Badan Litbang SDM dirumuskan dalam misi Badan Litbang SDM sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- Meningkatkan literasi masyarakat dan profesionalisme SDM di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan daya saing;
- Membangun dan mengembangkan jaringan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika;
- Meningkatkan peran pendidikan dan pelatihan multi media yang profesional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas data hasil penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika di daerah untuk menuju masyarakat

## Sasaran Strategis

Perencanaan Strategis menggambarkan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dalam Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran.

Sasaran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan SDM mengacu pada sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun Sasaran Strategis Badan Litbang SDM adalah:



*Foto Aptika ( Media Pertunjukan Rakyat)*



Tabel 1 Sasaran Strategis Badan Litbang SDM :

<b>M4</b>	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan	
	S4.1	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika
	S4.2	Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika

## Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan matrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Berdasarkan Renja Badan Litbang SDM Tahun 2013, Indikator Kinerja Badan Litbang tahun 2013 adalah:

1. Meningkatnya karya-karya riset dalam bidang Kominfo yang bermanfaat dan terpercaya.
2. Meningkatnya pemanfaatan karya riset oleh masyarakat dan industri.
3. Meningkatnya hasil karya riset yang mengakomodasi kebutuhan konsumen.
4. Meningkatnya karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang Kominfo.
5. Berkembangnya TIK Nasional berbasis riset TIK
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah SDM Kominfo yang profesional sesuai kompetensi dan profesi bidang Kominfo.

Foto Kegiatan 2013 (Konsinyering Kajian Mandiri 1)



## Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M. Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2010 memuat antara lain susunan organisasi Badan Litbang SDM pasal 628) yang terdiri dari Sekretariat Badan; Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Puslitbang SDPPI); Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Puslitbang PPI); Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang Aptika (dan IKP); dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informatika (Puslitbang Literasi dan Profesi). Tugas dan fungsi masing-masing bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama dalam dan luar negeri di lingkungan badan;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan badan;
- d. Pelaksanaan kepegawaian di lingkungan badan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta dokumentasi dan perpustakaan di lingkungan badan.

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaksanakan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Puslitbang SDPPI) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana, progam, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
  - b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi.
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Puslitbang PPI) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana, progam, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
  - b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi.
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan

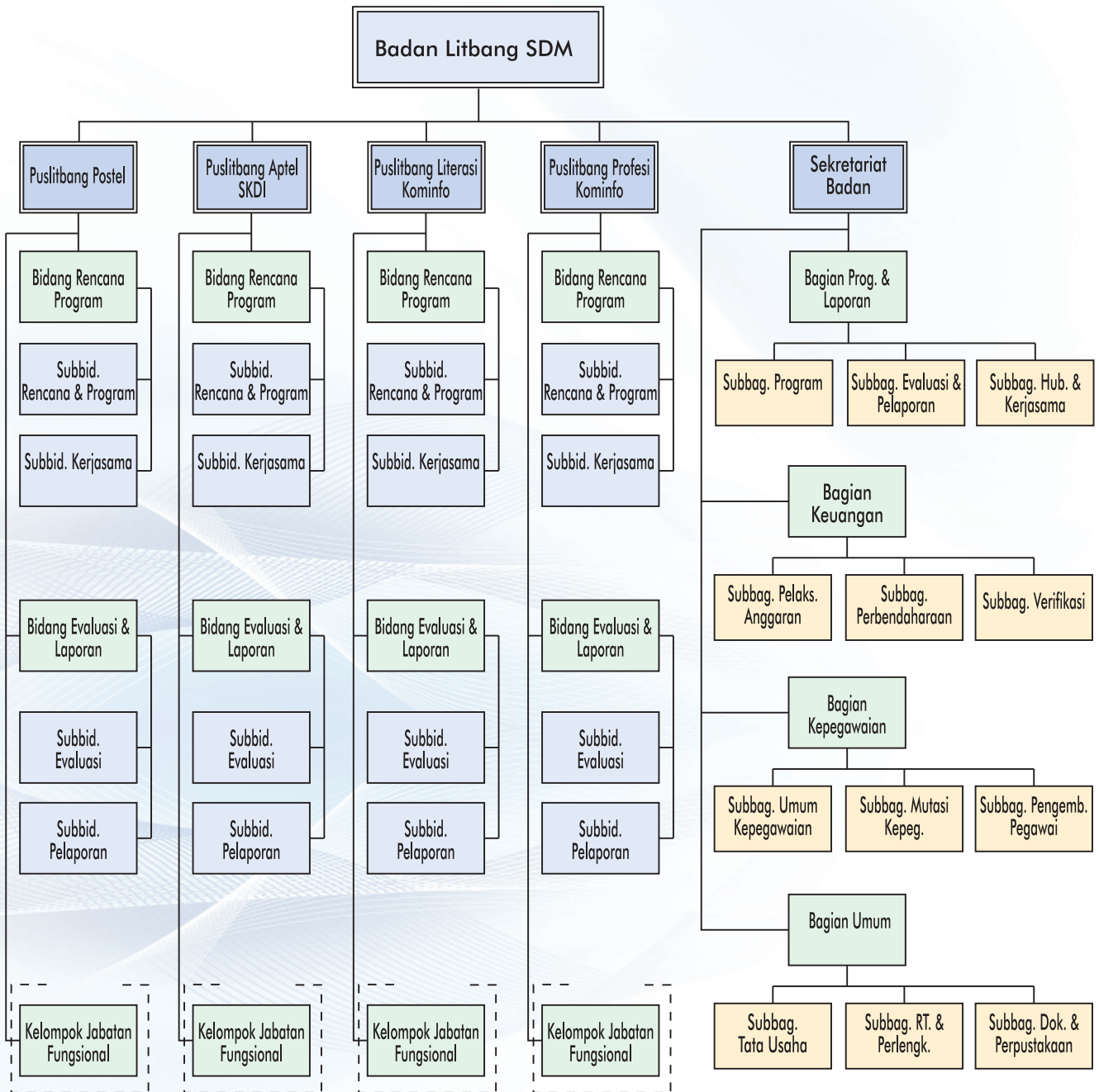


di bidang aplikasi informatika, informasi dan komunikasi public. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang APTIKA dan IKP) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, progam, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik;
  - b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sumber aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi.
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informatika Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang literasi dan profesi komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Penelitaan dan Pengembangan Lierasi dan Profesi Komunikasi dan Informatika (Puslitbang Lierasi dan Profesi) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana, progam, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang literasi dan profesi komunikasi dan Informatika;
  - b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang literasi dan profesi komunikasi dan Informatika; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi.

Adapun Struktur Organisasi Badan Litbang SDM berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tersebut diperlihatkan pada Gambar berikut.

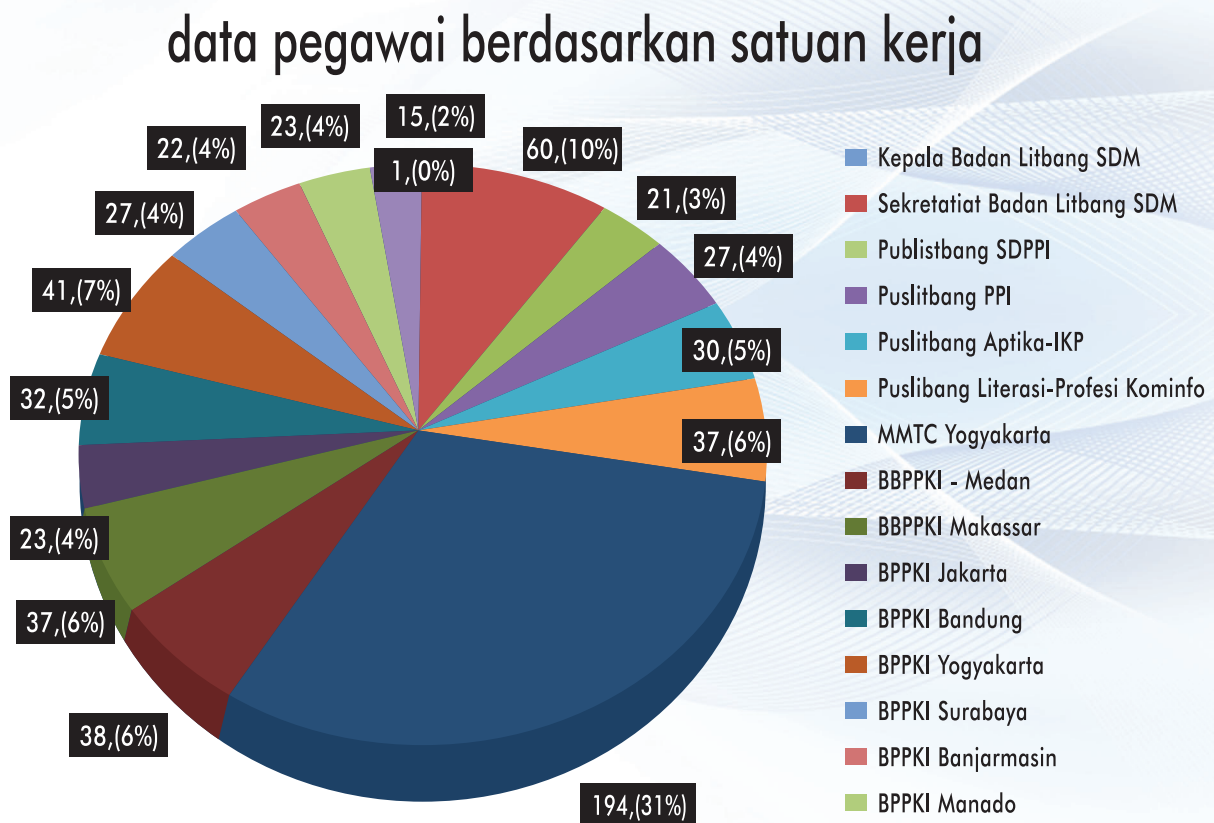
Bagan 1 Struktur Organisasi Badan Litbang SDM



## Sumber Daya Manusia

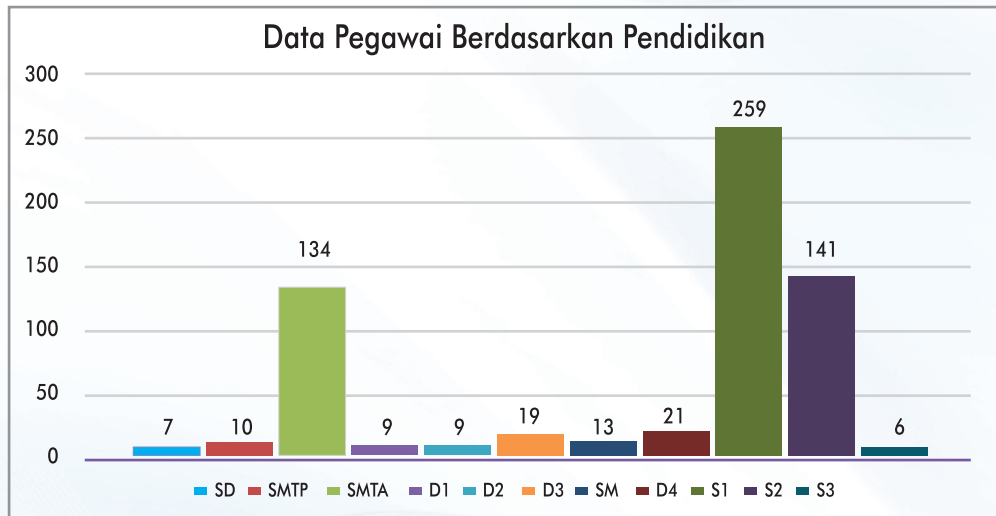
Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. Pegawai Badan Litbang per 31 Desember 2013 berjumlah 628 (enam ratus dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tersebar di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis, yaitu 2 (dua) wilayah BBPPKI Medan dan Makassar, serta 6 (enam) wilayah BPPKI diantaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Manado, Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta, dan BPPTIK Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

Bagan 2 Komposisi PNS Badan Litbang SDM berdasarkan Satuan Kerja :



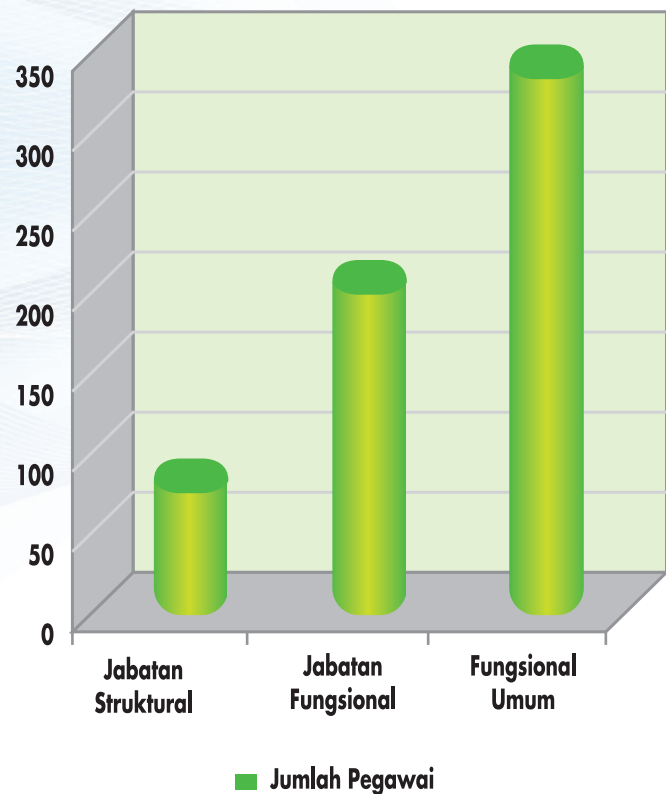
## Bab I

Grafik 1 Komposisi PNS Badan Litbang SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan :



Gambar 1 Komposisi PNS Badan Litbang SDM dengan Jabatan Tertentu

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah
Peneliti	111
Teknisi Litkayasa	40
Widyaiswara	32
Pranata Humas	12
Pustakawan	7
Analisis Kepegawaian	4
Arsiparis	3
Penerjemah	3
<b>Total</b>	<b>212</b>



## Anggaran

Pagu awal untuk anggaran tahun 2013 untuk Badan Litbang SDM sebesar Rp.187.665.568.000 (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sedangkan setelah efisiensi anggaran menjadi Rp.184.433.558.000 (Seratus delapan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Alokasi anggaran masing-masing Unit Kerja Eselon II tahun 2011 - 2013 dapat dilihat pada Gambar 5. Komposisi Anggaran Badan Litbang SDM Berdasarkan Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011-2013.

Grafik 2 Komposisi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2011-2013

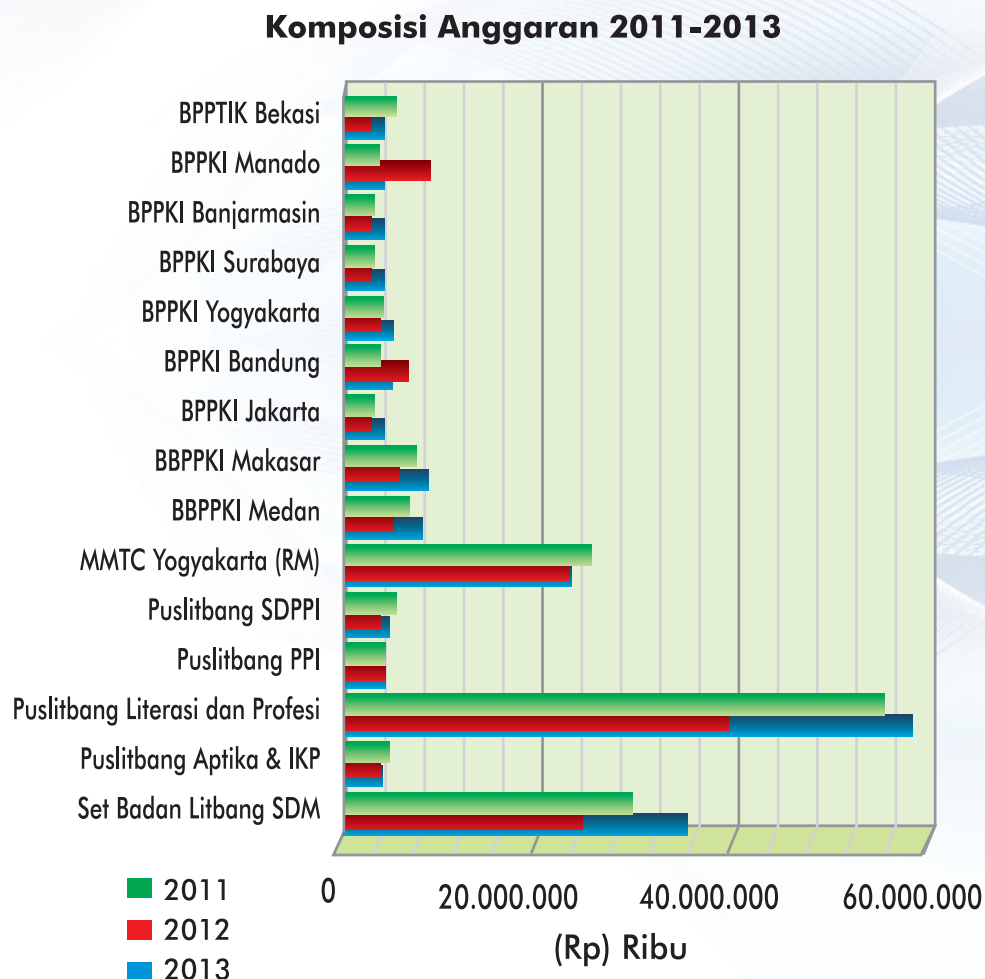


Foto Kegiatan Litprof 2013



Penyerapan anggaran Badan Litbang SDM sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 176.976.808.256,- (seratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan ribu dua ratus lima puluh enam) atau 95,96 %. Dengan demikian sisa anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan SDM sebesar Rp. 7.456.749.744,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) atau 4,0 %. Berikut Tabel Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM per 31 Desember 201 dan Realisasi Anggaran per Belanja TA 2013.

Tabel 2 Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM per 31 Desember 2013

KODE MAK	JENIS PROGRAM	PAGU DIPA 2011	PAGU DIPA REVISI	REALISASI	SISA ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
059.06.04	Program Penelitian & Pengembangan SDM	187.665.568.000	184.433.558.000	176.976.808.256	7.456.749.744	95,96

NO.	KODE	JENIS BELANJA	DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DIPA BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
1	51	Belanja Pegawai	48,811,280,000	36,370,459,036	74.51	11,743,909,244	24.06	48,114,368,280	98.57	696,911,720	1.43	
2	52	Belanja Barang	112,926,707,000	88,725,528,356	78.57	18,783,516,223	16.63	107,509,044,579	95.20	5,417,662,421	4.80	
3	52	Belanja Barang (PNBP)	6,558,558,000	4,741,365,700	72.29	1,168,210,225	17.81	5,909,575,925	90.10	648,982,075	9.90	
4	53	Belanja Modal	14,577,450,000	7,846,945,064	53.83	6,131,567,578	42.06	13,978,512,642	95.89	598,937,358	4.11	
5	53	Belanja Modal (PNBP)	1,559,563,000	407,160,150	26.11	1,058,146,680	67.85	1,465,306,830	93.96	94,256,170	6.04	
<b>JUMLAH RM</b>			<b>176,315,437,000</b>	<b>132,942,932,456</b>	<b>75.40</b>	<b>36,658,993,045</b>	<b>20.79</b>	<b>169,601,925,501</b>	<b>96.19</b>	<b>6,713,511,499</b>	<b>3.81</b>	
<b>JUMLAH PNBP</b>			<b>8,118,121,000</b>	<b>5,148,525,850</b>	<b>63.42</b>	<b>2,226,356,905</b>	<b>27.42</b>	<b>7,374,882,755</b>	<b>90.84</b>	<b>743,238,245</b>	<b>9.16</b>	
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>184,433,558,000</b>	<b>138,091,458,306</b>	<b>74.87</b>	<b>38,885,349,950</b>	<b>21.08</b>	<b>176,976,808,256</b>	<b>95.96</b>	<b>7,456,749,744</b>	<b>4.04</b>	

## **Situs Badan Litbang SDM**

Situs yang dikelola Sekretariat Badan Litbang SDM merupakan situs Badan Litbang SDM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang SDM Nomor: 16/KEP/BLSDM/KOMINFO/1/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang SK tim dan pengisian konten serta pengembangan website BLSDM 2012 dengan alamat <http://balitbang.kominfo.go.id>

Situs tersebut berisi 10 kanal yaitu kanal home, tentang kami, berita, media, publikasi, beasiswa, penelitian, pengembangan SDM, pelatihan, dan perpustakaan, yang memuat Berbagai macam informasi yang terkait dengan kegiatan rutin Badan Litbang SDM, publikasi

hasil-hasil penelitian, informasi beasiswa yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peraturan-peraturan, informasi pelatihan, bimtek dan sertifikasi yang diselenggarakan badan litbang SDM, serta katalog online perpustakaan Badan Litbang SDM.

Demi menunjang integrasi sistem informasi manajemen yang informatif dan akurat di lingkungan Badan Litbang SDM pada khususnya, dan Kementerian Komunikasi pada umumnya, Badan Litbang SDM telah mengembangkan beberapa aplikasi yang terkait dengan kepegawaian dan keuangan yaitu Sistem Informasi Kepegawaian (SIKAP), dan Aplikasi Pengendalian Program dan Keuangan (Laksana).

Dengan dikembangkannya aplikasi-aplikasi tersebut, diharapkan kinerja Badan Litbang SDM dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan harapan Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Gambar 2 Laman Situs Badan Litbang SDM www.balitbang.kominfo.go.id

Home
Tentang Kami
Berita
Media
Publikasi
Basiswa
Penelitian
Pengembangan SDM
Pelatihan
Perpustakaan

## Program Beasiswa S2 Luar Negeri Kementerian Kominfo Tahun 2014





Jurnal  
Telah Terbit  
Dapatkan segera!



BPPKI  
MERUPAKAN  
UJUNG TOMBAK  
KOMINFO

Yogyakarta (19/8/2014). Keberadaan BPPKI merupakan ujung tombak dalam penelitian dan pengembangan SDM di bidang Kominfo terutama di daerah-daerah pebatasan untuk keutuhan NKRI. Demikian diungkapkan...

Selengkapnya

Video Profil Galeri Streaming Radio

Profile BPRTIK



0:00 / 4:51

Berita

Jumat, 03 October 2014

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KARYA TULIS ILMIAH SEMINAR DALAM RANGKA TEMU ALUMNI KE-5 DI YOGYAKARTA



PENGUMUMAN  
SELEKSI KARYA  
TULIS ILMIAH  
SEMINAR DALAM RANGKA TEMU ALUMNI  
KE-5 DI YOGYAKARTA

HASIL  
SELEKSI KARYA  
TULIS ILMIAH

Siaran Pers

Minggu, 11 Mei 2014

Workshop I Fasilitasi Penyusunan Rancangan SKKNI Bidang Keahlian Data Centre Management



Workshop I Fasilitasi Penyusunan Rancangan SKKNI Bidang Keahlian Data Centre Management (Jakarta, 7 Mei 2014). Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Kominfo menyelenggarakan Workshop I Fasilitasi

Produk Unggulan

Informasi  
Basiswa

Informasi  
Penelitian

Bimtek &  
Sertifikasi PPID

Bimtek &  
Sertifikasi CIO

Aplikasi

- Publikasi Ilmiah dan Dokumentasi (PRAJNA)
- Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIKAP)
- Aplikasi Pengendalian Program dan Keuangan (Laksana)



# **Bab II**

Iktisar Kegiatan 2013



## Penelitian

Penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan strategi mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2013, berdasarkan Indikator Kinerja 2013, Badan Litbang SDM memiliki target capaian sebanyak 12 karya penelitian. Namun demikian, selama tahun 2013, Satuan Kerja Pusat dan UPT Daerah Badan Litbang SDM secara keseluruhan telah menghasilkan 54 (lima puluh empat) penelitian bidang komunikasi dan informatika yang dibiayai dari DIPA Badan Litbang SDM dimana penelitian dilakukan secara swakelola kelompok ataupun mandiri.

Selain itu, 11 (sebelas) penelitian tambahan dilaksanakan bekerjasama dengan instansi lain dimana 7 (tujuh) penelitian dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan 4 (empat) penelitian dibiayai oleh Balai Penyediaan dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Berikut merupakan ikhtisar hasil penelitian Badan Litbang SDM tahun 2013:

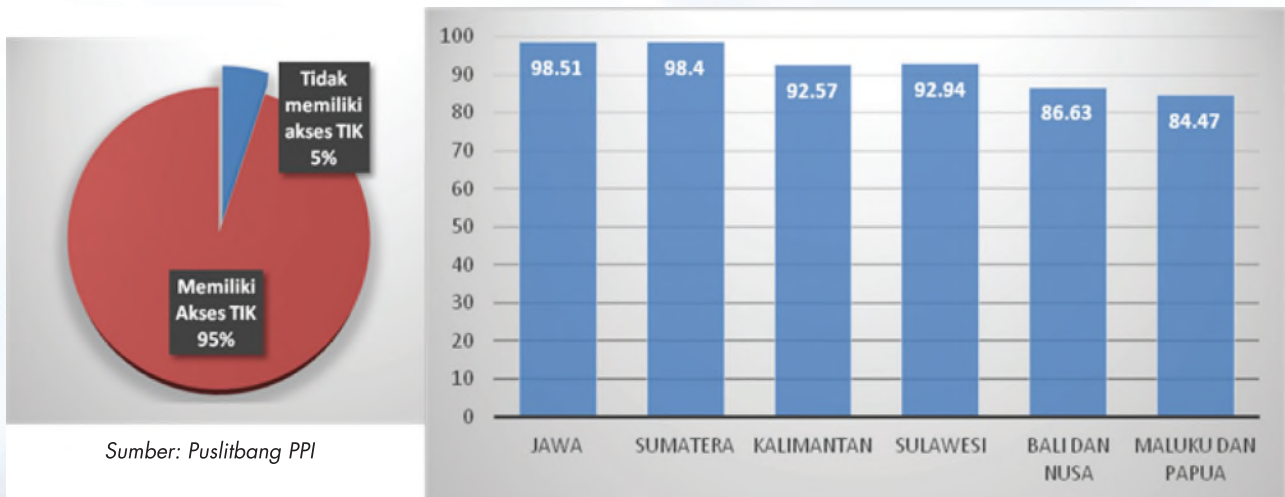
### Indikator TIK (ICT Household 2013)

- Pelaksana studi ini adalah seluruh BBPPKI dan BPPKI Badan Litbang SDM dengan payung kegiatan berada di Puslitbang PPI.
- Tujuan studi ini adalah untuk memetakan kondisi dan perkembangan TIK di Indonesia melalui pemutakhiran data indikator TIK pada sektor rumah tangga dan individu.
- Metodologi penelitian menggunakan survei berskala nasional dengan mengadopsi standar pengukuran TIK yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dan telah diadopsi oleh banyak negara sehingga hasil survei dapat dibandingkan dengan hasil negara-negara adopter lainnya.

## Bab II

- Hasil analisis memperlihatkan bahwa secara umum, akses terhadap TIK rumah tangga di Indonesia sudah cukup tinggi, yaitu sebesar 95%.

Gambar 3 Akses TIK Rumah Tangga Indonesia dan Sebarannya



- a. Variasi akses TIK antar wilayah di Indonesia tidak terlalu besar, yaitu yang terbesar 98.5% di wilayah Pulau Jawa dan yang terkecil 84.5% di wilayah Maluku & Papua. Demikian juga untuk wilayah yang aksesnya mudah (98.5%) dengan wilayah yang aksesnya sulit (81.0%). Besarnya akses terhadap TIK lebih dominan dicerminkan oleh akses terhadap televisi, dimana 90% rumah tangga di Indonesia telah memiliki televisi. Sedangkan akses terbesar kedua adalah mobile phone (HP), yang kepemilikannya cukup tinggi yaitu sebesar kitar 86%.
- b. Akses terhadap TIK secara umum sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi rumah tangga, pendidikan kepala keluarga, dan ketersediaan TIK tersebut di tempat tinggalnya. Akses terhadap TIK oleh rumah tangga yang paling rendah berturut-turut dari yang terkecil adalah telepon kabel (9.3%), internet (21%), komputer/laptop (26%), dan radio (35%). Kepemilikan radio ternyata tergolong cukup kecil (<50%) karena karena fungsi radio dipandang sudah terpenuhi dari televisi.

- c. Walaupun akses rumah tangga terhadap internet masih kecil, namun secara individu ternyata 74% menyatakan telah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Tempat/alat utama mengakses internet adalah di rumah (37%), HP (25%), warnet (15%) dan di kantor (13%). Akses terhadap internet sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan usia. Berdasarkan tingkat pendidikan, yang memiliki akses tertinggi terhadap internet adalah S2/S3 dan Diploma/S1. Menurut usia, pengguna internet paling banyak pada usia 9-25 tahun. Sedangkan menurut jenis pekerjaan, yang memiliki akses tertinggi terhadap internet adalah PNS/TNI/Polri, Pelajar/Mahasiswa, dan karyawan swasta. Pada umumnya, internet digunakan untuk membuka situs jejaring sosial, melakukan aktivitas belajar, dan menerima /mengirim email.
- d. Televisi merupakan TIK yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Secara umum, acara televisi yang paling banyak ditonton oleh masyarakat adalah berita (47.5%), sinetron/drama (28.8%), dan acara olah raga (7.3%).

## **Studi Pemanfaatan Digital Devidend untuk Layanan Long Term Evolution (LTE)**

- Pelaksana studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- Tujuan dari studi ini yaitu untuk melihat pemanfaatan digital dividend spektrum frekuensi radio untuk layanan LTE serta model bisnis multiplexer TV digital secara nasional.



**LTE** 4G



- Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan *link budget*, diketahui bahwa jangkauan paling besar yaitu terdapat di daerah *rural* kemudian disusul berturut-turut daerah *sub urban*, *dense urban* dan *urban*. Daerah *rural* memiliki jangkauan paling besar karena wilayah tersebut memiliki gedung-gedung dengan ketinggian rendah dan kerapatan kurang, serta memiliki banyak pepohonan sehingga memiliki *path loss* (redaman) yang paling kecil dibanding daerah lainnya. Kapasitas user per site dalam 1km<sup>2</sup> dari urutan terbesar ke kecil berturut-turut yaitu daerah *rural*, *sub urban*, *urban* dan *dense urban*. Daerah *rural* memiliki kapasitas terbesar karena aktivitas penggunanya paling sedikit dibanding dengan daerah lainnya. Estimasi jumlah pelanggan LTE di Indonesia paling besar yaitu di daerah *dense-urban* yaitu mencapai 500 user/km<sup>2</sup> pada tahun ke-8. Jumlah operator LTE-700 MHz paling optimum sebanyak 3 operator dengan pembagian bandwidth yaitu: Telkomsel sebesar 20 MHz, Indosat sebesar 15 MHz dan XL Axiata sebesar 10 MHz. Kombinasi frekuensi Low Band dan High Band untuk LTE sebagai solusi coverage dan capacity. Dari hasil perhitungan analisis untung-rugi (Cost-Benefit Analysis), model FL-LRAIC+ dengan metode Bottom Up yang diatur dalam Permenkominfo 18 Tahun 2012 tidak layak digunakan karena tidak memperhitungkan valuasi konten dimana konten ber-rating tinggi atau ber-rating rendah yang menyangkut kepada pendapatan iklan. Usulan model bisnis LP3M kedepannya berbasis share revenue dimana Mux Operator hanya berperan sebagai content aggregator yang menjadi jembatan antara Content Operator dan Advertiser dengan Network Operator.



## Studi Kesiapan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dalam Menerapkan ISO/IEC Guide 17065

- Pelaksana studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- Tujuan dari studi ini yaitu untuk merekomendasikan langkah yang dapat dilakukan oleh Direktorat Standardisasi dalam menerapkan ISO/IEC Guide 17065.
- Hasil penelitian berdasarkan self assessment yang diberikan kepada Direktorat Standardisasi menunjukkan bahwa tingkat kinerja Direktorat Standardisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemenuhan dokumen ISO. Hal ini menunjukkan bahwa 69,75% pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Standardisasi telah sesuai dengan persyaratan dalam dokumen ISO/IEC 17065, dengan tingkat kesenjangan operasionalisasi. Sedangkan untuk dapat menerapkan ISO/IEC 17065 secara sepenuhnya, Direktorat Standardisasi masih dalam kondisi 54,88%, dengan tingkat kesenjangan dokumentasi. Hal ini terkait dengan pemenuhan dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi atau SOP yang sesuai dengan persyaratan dokumen ISO/IEC 17065. Selain itu, dilihat dari masing-masing sub kategori persyaratan, sebagian besar kinerja Direktorat Standardisasi telah sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam dokumen ISO/IEC 17065, kecuali untuk beberapa hal yang secara proses memang menjadi kendala bagi Direktorat Standardisasi, seperti dalam kegiatan survailen yang membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Hampir seluruh sub kategori persyaratan ISO belum memiliki dokumen langkah kerja atau SOP dan masih dalam tahap penyusunan, kecuali untuk dokumen yang bersifat kelembagaan dan skema sertifikasi. Bila dilihat dari persyaratan ISO yang menegaskan tentang struktur manajemen dan hal lain yang terkait, struktur organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Standardisasi saat ini memiliki kendala untuk mendapatkan ISO/IEC 17065.

terjadi disparitas efisiensi antar operator dimana yang terbesar mencapai 300,4 sedangkan yang terkecil 4,5. Efisiensi penggunaan spektrum frekuensi di Indonesia secara ekonomi dinyatakan bentuk pendapatan atau profit. Kendala tersebut berada dalam manajemen ketidakberpihakan dimana badan yang menyusun standar dan regulasi merupakan badan yang memberikan sertifikasi. Hal ini dapat menyebabkan keputusan hasil sertifikasi tidak bersifat mutlak dari lembaga atau unit yang melakukan teknis proses sertifikasi dan dapat di interferensi oleh kewenangan diatas lembaga sertifikasi produk atau unit kerja yang melaksanakan fungsi tersebut.

### Studi Potensi Pasar Sekunder Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari studi ini yaitu untuk melihat gambaran kedepan pengaturan pasar sekunder frekuensi radio di Indonesia dan sebagai masukan dalam perancangan revisi Undang-Undang Telekomunikasi.
- **Hasil** penelitian memperlihatkan bahwa:
  - a. Berdasarkan ITU-R SM.1046-1 yaitu jumlah pelanggan/MHz, dan besar trafik/MHz/km<sup>2</sup> terdapat disparitas efisiensi penggunaan spektrum frekuensi (dalam jumlah pelanggan/MHz) antar operator seluler di Indonesia, dari yang terkecil 200 ribu pelanggan/MHz hingga yang terbesar adalah 1,6 juta pelanggan/MHz. Demikian pula efisiensi pada operator FWA, yang terkecil adalah 35 ribu pelanggan/MHz serta yang terbesar mencapai 2,4 juta/MHz. Efisiensi rata-rata trafik voice dalam Erl/MHz/km<sup>2</sup>/tahun mencapai 10,83. Terdapat disparitas efisiensi antar operator seluler. Yang tertinggi mencapai 17,8 sedangkan yang terendah adalah 0,6. Disparitas ini terjadi pula pada operator FWA.

Efisiensi rata-rata trafik data dalam Byte/Hz/Km<sup>2</sup>/tahun adalah 166,8. Dalam trafik data pun atau nilai tambah maksimum yang dapat dihasilkan dari sebuah sumber daya frekuensi yang terbatas. Dengan melihat perbandingan revenue/expense/MHz dan EBITDA, tingkat efisiensi antar operator besar di Indonesia hampir sama, tetapi bila dibandingkan dengan operator dengan basis pelanggan yang kecil terdapat disparitas yang cukup besar. Pemberlakuan BHP berdasar pita frekuensi yang dikuasai yang menggantikan BHP berdasarkan ISR memberikan tekanan kepada operator untuk memanfaatkan spektrum lebih efisien.

- b. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi potensi pasar sekunder spektrum frekuensi radio di Indonesia adalah faktor regulasi dan teknologi. Faktor regulasi yang paling berpengaruh adalah regulasi pemindahtanganan spektrum frekuensi dan jenis lisensi yang dapat dipindahtangankan sedangkan faktor teknologi adalah ekosistem teknologi dan implementasi teknologi netral. Di Indonesia, regulasi tidak membolehkan terjadinya pemindahtanganan spektrum frekuensi kecuali dengan izin menteri dan lisensi spektrum melekat pada ijin penyelenggaraan jaringan serta sebagian besar spektrum belum netral teknologi. Hal ini merupakan faktor penghambat utama diberlakukannya pasar sekunder berupa transfer lisensi spektrum dan penyewaan lisensi spektrum. Ekosistem bisnis pada sebuah spektrum dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan untuk menyediakan layanan pada spektrum tersebut. Spektrum akan mempunyai nilai yang tinggi jika ekosistem bisnis tumbuh dengan pesat. Pada spektrum dengan ekosistem bisnis yang stagnan akan menjadi faktor penghambat keberhasilan pemberlakuan pasar sekunder. Potensi pasar sekunder spektrum frekuensi radio, terutama spektrum seluler, di Indonesia sangat besar karena terdapatnya disparitas efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan pertumbuhan demand terhadap layanan yang tinggi.

Apabila hambatan utama pasar sekunder dari sisi regulasi dan teknologi dapat diatasi, maka potensi pasar sekunder spektrum frekuensi menjadi jauh lebih besar.

- c. Dampak positif diberlakukannya pasar sekunder spektrum frekuensi radio di Indonesia adalah meningkatnya efisiensi penggunaan spektrum yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelanggan yang dilayani oleh setiap kanal frekuensi dan meningkatnya trafik informasi yang ditransmisikan dalam sejumlah spektrum frekuensi. Dampak berantai yang diharapkan dari meningkatnya efisiensi penggunaan frekuensi adalah pengurangan harga untuk layanan yang sama atau peningkatan kualitas untuk layanan dengan harga yang sama serta peningkatan kesejahteraan masyarakat akibat peningkatan pemanfaatan telekomunikasi.
- d. Dampak negatif yang dapat terjadi akibat pemberlakuan pasar sekunder adalah kemungkinan terjadinya peningkatan biaya transfer hak penggunaan spektrum frekuensi yang akan berakibat tidak tercapainya efisiensi penggunaan spektrum. Kemungkinan terjadinya konsentrasi kepemilikan hak penggunaan spektrum frekuensi pada satu atau dua pemain dengan tujuan spekulasi.
- e. Dalam kasus dimana netral teknologi diberlakukan bersamaan dengan pemberlakuan pasar sekunder, resiko yang muncul adalah adanya biaya untuk koordinasi interferensi. Pemberlakuan pasar sekunder dapat menghambat regulator dalam upaya penataan spektrum terkait perubahan kebijakan untuk publik.
- f. Pemberlakuan pasar sekunder di Indonesia, terutama spectrum trading dan spectrum leasing memerlukan waktu yang cukup panjang dalam mempersiapkan kerangka regulasinya agar peningkatan efisiensi penggunaan frekuensi yang menjadi tujuan dapat tercapai dan meminimalisir dampak negatif.

## Studi Evaluasi Pelayanan Ditjen SDPPI

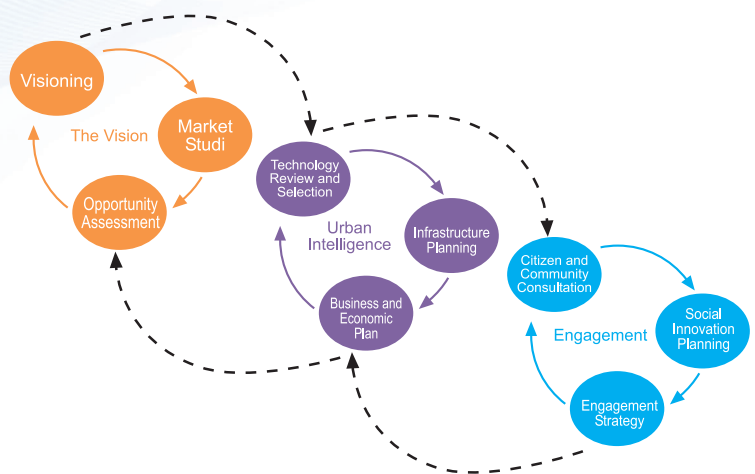
- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas, kekuatan serta kelemahan pelayanan internal Ditjen SDPPI dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang prima.
- **Hasil** analisis memperlihatkan bahwa:
  - a. secara keseluruhan indeks kepuasan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal berada pada kisaran 0,51 - 0,65. Indeks kepuasan pegawai yang berada pada kisaran tersebut masuk dalam kategori cukup puas. Dengan demikian kualitas pelayanan Direktorat Jenderal SDPPI masuk dalam kategori cukup baik.
  - b. Terdapat beberapa dimensi pelayanan internal yang kinerjanya sudah baik dan perlu dipertahankan, yaitu: Kepemimpinan, Pemberian Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai, Lingkungan Kerja, Komunikasi antar pegawai, antar pegawai dengan atasan dan antar unit kerja dan Peralatan dan Perlengkapan Kerja.
  - c. Terdapat tiga indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai, yaitu: Pendekatan interpersonal pimpinan kepada pegawai yang memiliki masalah yang mengganggu kinerja, Pengkomunikasian dan sosialisasi perubahan kebijakan dan indikator kinerja dan Administrasi kepegawaian yang tertib.

*Foto Kegiatan 2013 (Konsinyering IV Studi LTE di Bali)*



## Studi Tingkat Kematangan (Maturity) Smart City di Indonesia

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang PPI bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung.
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk menyusun model tingkat kematangan *Smart City* dan mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi tingkat kematangan *Smart City* di Indonesia serta merekomendasikan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota terhadap pengembangan *Smart City*.
- **Hasil** penelitian yang didapat berdasarkan studi di 3 (tiga) kota yaitu Bandung, Jakarta dan Surabaya bahwa (1) tingkat kematangan *Smart City* di kota Surabaya adalah yang paling tinggi sehingga sangat cocok untuk pengembangan *Smart City* di Indonesia; (2) domain tata kelola perlu mendapat perhatian yang lebih besar untuk pengembangan *Smart City* ke depan khususnya untuk kota Bandung dan DKI Jakarta. Sedangkan pada domain layanan, aspek integrasi dan sharing data masih perlu ditingkatkan. Kemudian pada domain infrastruktur, secara umum tingkat kematangannya sudah cukup baik di semua kota; (3) terdapat kendala yang sama dalam melakukan sharing data, yaitu terbenturnya aturan yang membatasi sharing data kependudukan dari Disdukcapil. Penelitian merekomendasikan beberapa hal yaitu: (1) perlu adanya kajian yang lebih komprehensif terhadap kemungkinan dilakukan sharing data kependudukan untuk menunjang terwujudnya *Smart City*, baik dari aspek legal formal, maupun aspek teknis serta penyusunan panduan pengembangan *Smart City* di Indonesia untuk menjadi guide bagi kota-kota di Indonesia dalam mengembangkan *Smart City*.



## Model Layanan Tata Kelola PLIK di Indonesia sebagai Akses Informasi Bagi Pemberdayaan Masyarakat

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang PPI
- **Tujuan** dari studi ini untuk mendiskripsikan model layanan tata kelola PLIK dan juga bagaimana pemanfaatan PLIK Sebagai Layanan Akses Internet oleh Masyarakat.
- **Hasil** menunjukkan bahwa PLIK sangat bermanfaat untuk proses pemerataan akses internet bagi pemberdayaan masyarakat, dan diperlukan orientasi pemerataan informasi kepada masyarakat yang sustainable, baik informasi yang bersifat ilmu pengetahuan maupun kepentingan pasar serta Layanan Tata Kelola PLIK ke depannya perlu mendapat perhatian pimpinan, agar tidak ada lagi daerah blank spot atau yang tidak terjangkau oleh TIK. Rekomendasi yang diberikan diantaranya (1) di masa mendatang agar dilakukan perubahan total dalam Layanan Tata Kelola PLIK, supaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan terus secara kuantitas maupun kualitas; (2) sudah saatnya kalangan perguruan tinggi dilibatkan secara langsung, dalam konteks perencanaan, penempatan dan pengawasan operasionalisasi PLIK; (3) kebijakan yang sudah ada tentang PLIK sebaiknya di reposisi dan restrukturisasi, fungsi serta manfaatnya agar terwujud pemberdayaan masyarakat yang efektif.



Foto Mobil PLIK

## **Internet sebagai Stimulan Masyarakat menuju Desa Pinter Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur**

- **Pelaksana** penelitian ini adalah Puslitbang Literasi dan Profesi
- **Tujuan** penelitian adalah untuk memberikan rekomendasi bagaimana internet dapat berperan menjadi stimulator masyarakat pedesaan dan pihak-pihak yang perlu berperan dalam memfasilitasi masyarakat pedesaan untuk mampu mencari informasi melalui internet.
- **Penelitian** ini dilaksanakan atas pertimbangan bahwa salah satu kebijakan populer yang dirancang untuk memperluas akses informasi digital ke daerah pedesaan adalah melalui pemberian fasilitas komputer yang dilengkapi akses internet atau dikenal dengan Desa Pinter (Desa Punya Internet). Berdasarkan analisis kasus Desa Selorejo, terdapat berbagai permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan program ini, diantaranya fasilitas yang disediakan pada Pusat Pelayan Internet Kecamatan (PLIK) tidak diberdayagunakan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat yang umumnya merupakan petani jeruk belum banyak memanfaatkan PLIK kecuali anak-anak. Masyarakat masih memerlukan motivasi dan stimulan serta pembekalan keterampilan praktis agar mau dan mampu memanfaatkan internet dalam mencari informasi yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup mereka. Permasalahan lain adalah dibutuhkan bantuan dari relawan TIK, guru atau pembimbing yang harus ditugaskan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan fasilitas internet yang telah disediakan.



## Studi Evaluatif Tata Kelola Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Sebagai Model Layanan Akses Informasi Masyarakat Kecamatan

- **Studi** dilakukan oleh beberapa satuan kerja dengan memiliki cakupan analisis yang berbeda-beda, diantaranya Puslitbang PPI, BBPPKI Makassar, BPPKI Yogyakarta, BPPKI Banjarmasin.
- **Tujuan** studi adalah untuk mendeskripsikan tata kelola Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sebagai model layanan akses informasi masyarakat kecamatan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan bagi pengelola MPLIK.
- **Puslitbang PPI** menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan MPLIK yaitu berkesinambungan, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, kondisi geografis yang harus dipertimbangkan secara seksama, dan kejelasan mengenai segala peraturan terkait penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan MPLIK. Studi merekomendasikan beberapa hal diantaranya (1) Kementerian Kominfo melalui BP3TI hendaknya segera membenahi kinerja atau tata kelola MPLIK meliputi perencanaan kegiatan termasuk kebutuhan anggaran dan perpindahan operasi MPLIK, (2) penambahan kecepatan internet menjadi 512kpbs untuk MPLIK yang ada di kota-kota; (3) relokasi penempatan MPLIK yang kurang tepat sasaran; (4) keterlibatan para relawan IT sebagai operator MPLIK perlu dilanjutkan dan diberikan pelatihan mengenai teknis pointing, instalasi peralatan sehingga apabila ada kendala dapat langsung direspon atau diperbaiki; serta (5) melibatkan pemerintah provinsi untuk memonitor pelaksanaan MPLIK di lapangan.

- **BBPPKI Makassar** menghasilkan studi berjudul "Manajemen Pengelolaan MPLIK di Sulawesi Selatan" yang menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan MPLIK di setiap Kabupaten/Kota berbeda-beda, tidak ada keseragaman pengelolaan meskipun telah ada SOP. Kendala utama dalam pengelolaan MPLIK ialah Pemerintah daerah belum diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan MPLIK, sehingga MPLIK belum berjalan maksimal, dan sistem operasional komputer bagi pengguna MPLIK tidak familiar.
- **BPPKI Yogyakarta** mengadakan penelitian di wilayah kerjanya meliputi meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulonprogo.
- **BPPKI Banjarmasin** mengadakan analisis terkait MPLIK di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 70% masyarakat telah mengenal dan pernah menggunakan MPLIK meskipun belum optimal dalam pemanfaatan sebagai sarana perolehan informasi dan pengetahuan. Adapun hambatan dalam pemanfaatan MPLIK cukup beragam diantaranya akses internet yang lambat, lokasi yang jauh, jumlah laptop dan petugas terbatas dan sebagainya. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya peningkatan sosialisasi oleh pengelola MPLIK di daerah (Diskominfo Pemda) secara berjenjang dari kecamatan, kelurahan, dan RW/RT. Selain itu, hambatan teknis dapat diatasi melalui penambahan bandwidth dan optimalisasi kualitas sinyal dengan menggunakan frekuensi yang lebih tahan terhadap gangguan cuaca.

## Pengembangan Media Pertunjukan Rakyat Dalam Mendukung Komunikasi Publik

- **Pelaksana** penelitian ini adalah BBPPKI Medan
- **Tujuan** penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pengembangan model media pertunjukan rakyat yang ada di berbagai wilayah tanah air dan menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo dalam mengidentifikasi model pengembangan media pertunjukan rakyat sehingga dapat digunakan sebagai saluran komunikasi publik guna mendukung terwujudnya masyarakat informatif.



- Media pertunjukan rakyat yang merupakan salah satu warisan seni tradisional adalah contoh budaya lokal yang memiliki nilai dan kearifan namun eksistensinya saat ini mulai tergerus dengan perkembangan dan kemajuan budaya modern. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan:
  - a. Terjadi asimilasi (percampuran) budaya antara budaya setempat dengan budaya pendatang yang menambah khasanah budaya tersebut;
  - b. Penyebab semakin berkurangnya keberadaan media pertunjukan rakyat dan minimnya minat masyarakat diakibatkan kurangnya kreativitas para pelaku seni

- dalam meramu strategi pementasan yang menimbulkan kesan monoton dan membosankan dan minimnya dukungan pemerintah dalam pendanaan dan penyediaan infrastruktur;
- c. Desain pemanfaatan media harus disesuaikan dengan harapan dan keinginan penonton, terutama untuk topik dan bahasa yang digunakan agar lebih mudah dipahami sehingga tujuan penyampaian pesan dapat tepat sasaran.
  - d. Pemanfaatan TIK dalam mendukung seni pertunjukan rakyat dapat dibarengi dengan aktivitas pementasan ke dalam website sharing video seperti youtube dan situs jejaring sosial agar pengunjung dapat melihat dan mendalami tentang alur cerita yang disajikan. Selain itu, penggunaan seni digital seperti musik, tata panggung, video, dan pencahayaan dapat dimanfaatkan untuk menambah semarak pementasan seni tradisional.
- Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan agar eksistensi seni pertunjukan rakyat terjaga diantaranya:
    - a. Pemerintah daerah lebih proaktif dalam memberikan dukungan seperti bantuan sarana dan prasarana serta memperkenalkan ke dunia luar;
    - b. Lembaga pendidikan harus terlibat dalam memperkenalkan seni budaya tradisional, sebagai contoh mengadakan perlombaan atau acara pertunjukan secara rutin untuk diikuti oleh para siswa. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda pada seni pertunjukan tradisional sejak dini;
    - c. Para pelaku dan penggiat seni pertunjukan rakyat agar mampu mengemas pertunjukan dengan lebih menarik dan kreatif untuk menghindari kejenuhan penonton terhadap pertunjukan yang monoton;
    - d. Pemanfaatan internet dalam memperkenalkan dan menyebarkan seni pertunjukan tradisional diantaranya melalui situs jejaring sosial dan *video sharing*.

## Pemetaan Database Bidang Kominfo di Wilayah Kerja BBPPKI Makassar

- **Pelaksana** studi ini adalah BBPPKI Makassar
- **Tujuan** dari studi ini yaitu untuk memetakan potensi komunikasi dan informatika di wilayah kerja BBPPKI Makassar yang difokuskan di wilayah Sulawesi Tenggara.
- **Hasil** menunjukkan bahwa berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada 12 Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Tenggara masih tertinggal dalam hal pelaksanaan e-Government dimana setiap Kabupaten/Kota masih berada pada level awal dengan bermunculannya situs pemerintah, bahkan beberapa Kabupaten belum memiliki situs, ditambah dengan kurangnya SDM yang memiliki kapasitas yang memadai. Database ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh Kementerian Kominfo maupun Pemda Kabupaten/Kota untuk melakukan pengembangan potensi daerah di bidang Kominfo.



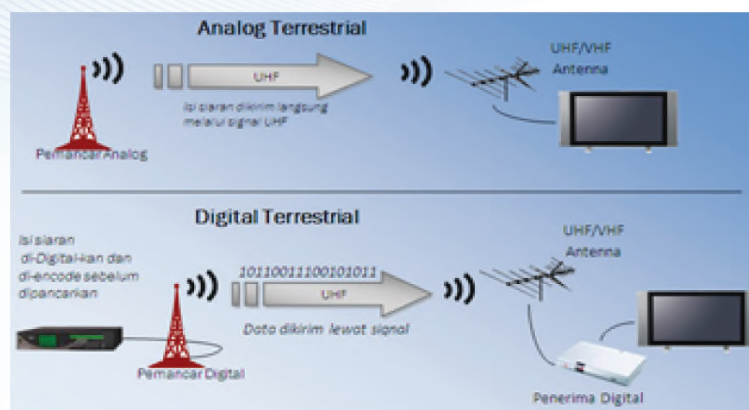
*Desa Informasi - UU ITE Aptika - Media Center*



## Kesiapan Masyarakat Menerima Konversi Televisi Analog ke Televisi Digital

**Tujuan** dari studi ini yaitu untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang informasi konversi/migrasi siaran televisi analog ke televisi digital serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan konversi tersebut.

**Penelitian** dilaksanakan di wilayah kerja BPPKI Banjarmasin yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah dimana hasil menunjukkan bahwa masyarakat di ketiga wilayah tersebut sebagian besar masih menggunakan televisi analog meskipun sering mengalami gangguan. Masyarakat menyatakan belum mengetahui mengenai peralihan televisi analog menuju televisi digital ini namun menunjukkan ketertarikan terhadap kebijakan dan menyanggupi penerapan alih teknologi, termasuk dalam penyediaan set-top-box melihat pada manfaat yang diberikan yaitu kualitas gambar dan suara serta ketahanan terhadap gangguan. Di lain sisi, sebagian masyarakat merasakan keberatan terhadap kebijakan migrasi ini dikarenakan biaya yang harus ditanggung cukup tinggi untuk mengganti televisi analog menjadi televisi digital. Berdasarkan hasil ini, peneliti merekomendasikan kepada Kementerian Kominfo khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk melakukan sosialisasi mengenai kebijakan migrasi ini dengan lebih intensif dan juga mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi *set-top-box* bagi masyarakat.



## Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Ekonomi Bahari

- **Pelaksana** penelitian ini adalah BPPKI Manado
- **Tujuan** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemanfaatan TIK bagi masyarakat nelayan yang berada di Provinsi Gorontalo dan korelasinya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat serta menguji teori tentang pembangunan Kominfo dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penelitian dilakukan pada masyarakat nelayan di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato dengan pertimbangan bahwa keempat daerah tersebut merupakan sentra produksi hasil laut masyarakat setempat. Berdasarkan analisis di wilayah-wilayah tersebut, peneliti melihat bahwa:
  - a. Pemanfaatan TIK masyarakat nelayan masih terbatas pada penggunaan alat-alat komunikasi yang umum seperti telepon selular (masih terkendala hal jangkauan area), sedangkan penggunaan *handy talky* (HT), GPS dan *fish finder* hanya digunakan oleh pengusaha ikan yang dengan ukuran kapal yang besar.
  - b. Kendala utama yang dihadapi dalam pemanfaatan TIK adalah ketersediaan infrastruktur TIK yang belum memadai terutama dikarenakan banyaknya *blank spot*, minimnya sosialisasi tentang pemanfaatan TIK, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan pada lambatnya respon pada peluang yang ada serta adopsi teknologi.
  - c. Kebijakan Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo dalam hal ini UPT Loka Monitoring Gorontalo dinilai belum memberikan sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat nelayan tentang prosedur dan syarat pengurusan izin radio amatir

- sehingga ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak pemerintah terkait dengan penyitaan kelengkapan pesawat/radio komunikasi yang mereka gunakan pada saat petugas melakukan penertiban/*sweeping* frekuensi.
- d. Implementasi TIK dalam pembangunan ekonomi kelautan masyarakat nelayan di Provinsi Gorontalo belum terlihat geliatnya di masyarakat nelayan baik dampak maupun aktivitasnya. Sejauh ini implementasi pembangunan ekonomi masyarakat nelayan lebih berorientasi dan diwujudkan dalam bentuk program bantuan sarana dan prasarana seperti bantuan alat tangkap, perahu dan bantuan langsung tunai serta penguatan aktivitas kelembagaan.
  - e. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar Pemerintah Provinsi Gorontalo membuat kebijakan mengenai *blue print* TIK di Provinsi Gorontalo dan menjadikan pengembangan TIK sebagai skala prioritas dalam pembangunan ke depan. Selain itu Kementerian Kominfo hendaknya melakukan sosialisasi mengenai syarat dan prosedur perolehan izin radio amatir atau radio komunikasi dan mendistribusikan layanan program desa bordering (PLIK dan MPLIK) ke sentra-sentra pemukiman masyarakat nelayan/pesisir.

### **Kajian Pengaruh Investasi ICT Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,**

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang APTIKA dan IKP
- **Tujuan** dari studi ini untuk menghitung/mengestimasi pengaruh sektor dan/atau investasi TIK terhadap pertumbuhan output sektoral di Indonesia yang akan digunakan sebagai salah satu dasar gambaran pengambilan kebijakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :



- untuk melihat peran dan kontribusi TIK terhadap perekonomian melalui analisis pengganda dan keterkaitan;
- untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi TIK terhadap perekonomian (PDB, nilai tambah, tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga); dan
- untuk mengetahui hal-hal apa saja yang penting bagi kebijakan sektor dan/atau kebijakan investasi TIK di Indonesia.

## Kajian Kelembagaan Aptika Terhadap Regulasi ITE

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang APTIKA dan IKP
- **Tujuan** dari kajian ini mengidentifikasi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA) sesuai dengan Undang-undang No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 serta PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta peraturan lainnya, serta menyusun acuan dan struktur kelembagaan Ditjen APTIKA yang efektif dan efisien dalam menjalankan amanat UU ITE dan peraturan lainnya yang sejenis..
- **Hasil** kajian merekomendasikan bahwa terdapat beberapa implementasi UU ITE dan PP yang dapat dimaksimalkan melalui penyusunan rumusan kebijakan, standar dan prosedur operasional serta tata kelola penyelenggaraan yang disusun secara kolektif oleh seluruh direktorat sesuai bidang masing-masing terkait Pendaftaran, Perangkat Keras, Piranti Lunak, Tenaga Ahli, Tata Kelola Penyelenggaraan Layanan TIK, Pengamanan, Sertifikasi Kelaikan dan Pengawasan.

# Studi Pengelolaan Sampah Satelit Indonesia

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan sampah satelit oleh penyelenggara satelit Indonesia dan merumuskan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah satelit.
- **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa secara umum, saat ini penanganan satelit yang habis masa operasinya atau yang sudah tidak berfungsi yang dilakukan oleh penyelenggara satelit adalah dengan melakukan deorbit satelit tersebut. Pemerintah sudah mengadopsi ketentuan Internasional Telecommunication Union (ITU) mengenai deorbit satelit ke dalam Permenkominfo No.13/P/M.Kominfo/8/2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit sebagaimana diubah dengan Permenkominfo No.37/P/M.Kominfo/12/2006. Namun, pasal deorbit terkait belum menjelaskan secara detail mengenai kriteria satelit yang wajib deorbit sehingga masih bias. Selain itu, meskipun ketentuan deorbit bersifat wajib, namun pada pelaksanaannya pemerintah (Kemkominfo) tidak bisa memberikan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini dan tidak memiliki instrumen untuk mengawasi mekanisme deorbit apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.



*Kegiatan SDPPI ( konsyinering I studi LTE )*



## Evaluasi Penyelenggaraan Radio Trunking Terrestrial di Indonesia

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi penyelenggaraan jasa trunking dilihat dari efisiensi penggunaan frekuensinya dan juga untuk mendapat gambaran mengenai kecenderungan pertumbuhan pelanggan radio trunking di Indonesia
- **Hasil penelitian yang didapat** bahwa (1) Mayoritas penyelenggara radio trunking memiliki nilai GOS di bawah 5 %. Dengan demikian tingkat ketersediaan kanal suara cukup baik. (2) Tujuan dari sistem trunking adalah untuk efisiensi frekuensi, tapi kenyataan di lapangan banyak sistem trunking yang penggunaan frekuensinya berlebihan, terlihat dari nilai GOS yang sangat kecil. Selain disebabkan oleh kesalahan desain jaringan, juga karena beberapa klien meminta kanal frekuensi khusus. (3) Secara keseluruhan potensi pertumbuhan pelanggan radio trunking cukup bagus, rata-rata sebesar 17.75% per tahun. (4) Secara moderat dan optimistik, hasil proyeksi sampai lima tahun memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah pelanggan cenderung positif (mengalami peningkatan). (5) Ijin telekomunikasi khusus masih dikeluarkan tanpa memperhatikan keberadaan penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi di wilayah yang bersangkutan.

## Studi Perencanaan Migrasi Sistem Radio Trunking Digital

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk mengetahui perencanaan dalam migrasi sistem radio trunking digital.

- **Hasil penelitian yang didapat** bahwa (1) tingkat prosentase kesiapan operator radio trunking di Indonesia berada dikisaran 38,60 % sampai dengan 50,88 % (2) langkah termudah dalam langkah perencanaan adalah proses define dimana sebagian besar perusahaan penyelenggara radio trunking telah menentukan gambaran bagaimana kondisi perusahaan terhadap permintaan pasar dan ekosistem bisnis trunking.

### **Studi pengembangan Internet yang Didukung Kualitas Kebijakan Publik**

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi pengembangan internet yang didukung kualitas layanan publik dalam menunjang meningkatnya pengguna internet dan perkembangannya, meliputi: (1) Tingkat manfaat penggunaan internet (2) Tingkat kesesuaian antara kinerja kualitas pelayanan publik yang dirasakan dengan yang diharapkan oleh pengguna internet (3) Membangun efektivitas kinerja dinas kominfo di daerah; (4) Kebijakan publik yang mendukung perkembangan pengguna internet yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- **Hasil penelitian yang didapat** bahwa (1) Peran stakeholders bidang internet dalam kerangka yang terkoordinasi akan dapat membangun pemerataan pembangunan jaringan internet yang terjangkau oleh seluruh warga masyarakat dan optimisme meningkatnya pengguna internet dan berkembangnya bisnis online diharapkan dapat mempercepat peningkatan jumlah pengguna internet; (2) Peran APJII dalam penyelenggaraan internet dan dalam menangani ISP masih ada kelemahan dengan

terindikasinya bahwa masih ada ISP ilegal yang dipandang merugikan pihak pengguna internet maupun ISP yang legal; (3) Pembangunan masyarakat dalam usaha internet online mulai berkembang terus, kondisi pengguna internet untuk bermain game online semakin meningkat.

## **Analisis Kualitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Siaran Dengan Metode Importance Performance Analysis (IPA)**

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi melalui persepsi penyelenggara radio siaran, berkaitan dengan perijinan radio siaran (ISR) yang dapat menggambarkan angka indeks dari kinerja layanan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk radio siaran.
- **Hasil penelitian yang didapat** bahwa (1) Berdasarkan pembahasan terhadap hasil IPA dari setiap dimensi dan hasil wawancara, pemenuhan proses perijinan untuk Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya untuk Radio Siaran disimpulkan bahwa, secara keseluruhan, proses perijinan Izin Radio Siaran (ISR) untuk radio siaran sudah baik, namun ada yang perlu untuk ditingkatkan yaitu atribut pada kadran I. (2) Ada 3 (tiga) faktor yang menurut persepsi pengguna frekuensi radio sangat penting dan harus mendapat prioritas penanganan dan perhatiannya, yaitu: pelayanan perizinan dilakukan dengan cepat, mempermudah dan tidak berbelit; proses perizinan tepat waktu; kemudahan penyampaian permohonan ISR. (3) Dimensi Tangible (kasat mata) mendapatkan skor rata-rata tertinggi yaitu 4,34 artinya penilaian pengguna frekuensi radio siaran pada penampilan fisik, peralatan, (4) karyawan serta sarana

komunikasi pada proses layanan perijinan penggunaan frekuensi radio siaran mendapat penilaian tertinggi, yang terdiri dari: Kemudahan pengisian dan penggunaan formulir aplikasi perizinan, Kemudahan pembayaran BHP Frekuensi Radio, dan Kualitas cetakan ISR yang diterima. (5) Dimensi Responsiveness (daya tanggap), untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada pengguna dengan cepat. Mendapat skor terendah yaitu 4,05. pada peringkat kelima, terdiri dari: Kemampuan petugas untuk cepat tanggap terhadap keluhan pengguna, Kemampuan petugas dalam memberikan informasi dengan jelas dan mudah dimengerti, Kompetensi dan kecakapan petugas loket dalam melayani pengguna.

### **Pengaturan Kualitas Layanan (Quality of Services) Jasa Akses Internet Di Indonesia Berdasarkan Regulatory Impact Analysis**

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk endapatkan gambaran tentang sejauh mana kualitas layanan jasa akses internet yang telah tersedia di Indonesia, serta menganalisis pengaturan kualitas layanan (*Quality of Service*) jasa akses internet yang berlaku di Indonesia.
- **Hasil penelitian yang didapat** bahwa (1) terindikasi bahwa level kualitas layanan jasa akses internet yang disediakan oleh penyelenggara jasa masih beragam atau belum standar. Dalam hal kinerja layanan, para penyelenggara jasa tampaknya dapat memenuhi kriteria standar. Kelemahan terbesar terletak pada rata-rata waktu aktivasi pelanggan baru. Sementara dalam hal kinerja jaringan, reliabilitas yang terlihat dari ketersediaan jaringan serta utilisasi bandwidth menjadi kendala utama. (2) Kualitas

layanan (quality of service) jasa akses internet di Indonesia dapat ditingkatkan melalui pengaturan standar kualitas layanan penyelenggaraan jasa akses internet. Hal ini sangat diperlukan oleh melindungi kepentingan masyarakat, dan didukung oleh pihak penyelenggara jasa. Dari hasil analisa terhadap regulasi pengaturan penyelenggaraan jasa akses internet didapatkan bahwa regulasi pengaturan tersebut memiliki cost dan benefit yang beriringan dan hal tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi semua stakeholder. Disisi lain, sangat penting pula menjaga kelangsungan jasa internet. Eksistensi ISP menjaga jembatan akses manusia ke dunia maya, sehingga dibutuhkan regulasi yang business friendly.

## **Evaluasi Kepuasan Pengguna Terhadap Kualitas Layanan Data Pada Smartphone di Wilayah DKI Jakarta**

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap kenyataan tingkat kinerja beserta harapan kepentingan layanan data pada smartphone di wilayah DKI Jakarta
- **Hasil penelitian yang didapat** bahwa (1) Analisa gap servqual terbesar operator Telkomsel adalah jaminan kualitas, untuk operator Indosat adalah kehandalan, untuk operator XL Axiata adalah reward dan bonus untuk pengguna, untuk operator Hutchinson adalah konsistensi, dan untuk operator Smart Telecom adalah ketepatan perbaikan masalah. (2) Fleksibilitas merupakan indikator dengan analisa gap servqual paling kecil untuk 4 operator, kecuali untuk operator Smart Telecom adalah indikator perhatian pada pengguna. (3) Kehandalan dan jaminan kualitas adalah indikator

dengan gap servqual terbesar untuk keseluruhan operator. (4) Tangibles adalah dimensi dengan tingkat kesesuaian kinerja-kepentingan paling tinggi baik untuk masing-masing operator maupun secara keseluruhan, namun 2 dari 4 indikator dimensi tangibles yaitu tampilan paket dan fleksibilitas layanan data dinilai memiliki nilai indeks kinerja berlebihan. (5) Reliability merupakan dimensi dengan tingkat kesesuaian paling rendah, terutama pada indikator kesesuaian paket layanan, kehandalan, konsistensi dan akurasi kecepatan kualitas layanan data. (6) Emphaty adalah dimensi dengan kinerja yang paling baik dibandingkan dengan dimensi lain khususnya pada indikator perhatian pada pengguna, mengutamakan pengguna, dan ruang interaksi pada pengguna. (7) Responsiveness adalah dimensi dengan prioritas rendah, terutama pada indikator proaktifitas respon, kesediaan respon, dan kecepatan respon teknologi. (8) Analisa tingkat kesesuaian kinerja-kepentingan untuk tiap operator seluler, nilai tertinggi dimiliki operator Smart Telecom (72%), disusul secara berurutan XL Axiata (71%), Hutchinson (70%), Telkomsel (68%), dan Indosat (67%). (9) Secara keseluruhan, analisa tingkat kesesuaian kinerja-kepentingan kualitas layanan data pada smartphone di wilayah DKI Jakarta berada pada tahap kesesuaian sedang dengan nilai kesesuaian 69%. (10) Tingkat kinerja mempengaruhi pengguna dalam memberikan harapan pada kualitas layanan data, semakin tinggi kinerja maka harapan pengguna juga akan lebih baik.



Studi Akhir ISO



## Studi Pengukuran Digital Divide Indonesia

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk (1) mengetahui besarnya nilai index digital divide di tiap propinsi di Indonesia, (2) mengetahui tingkat kesenjangan pembangunan TIK di 33 propinsi di Indonesia dan (3) menentukan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan TIK di masing-masing propinsi
- **Hasil penelitian yang didapat** bahwa (1) Nilai indeks digital divide di propinsi di Indonesia paling besar dimiliki oleh propinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. Hal ini disebabkan masih rendahnya pembangunan infrastruktur TIK terutama infrastruktur wireless yaitu Base Transceiver Station (BTS) 2G, BTS 3G atau node B dan BTS Fixed Wireless Access (FWA). Selain itu kemampuan/skill penduduk di propinsi tersebut sangat rendah sehingga tingkat penggunaan TIK nya sangat rendah dibanding dengan propinsi lainnya. (2) Nilai kesenjangan digital paling rendah terhadap propinsi DKI Jakarta adalah propinsi D.I Yogyakarta karena infrastruktur TIK baik jaringan maupun fasilitas TIK di propinsi D.I Yogyakarta paling banyak setelah DKI Jakarta. Selain itu kemampuan/skill mengakses TIK penduduk di propinsi D.I Yogyakarta sangat tinggi sehingga penggunaan TIK juga cukup besar. (3) DKI Jakarta sebagai propinsi dengan nilai infostate paling tinggi karena infrastruktur TIK, kemampuan penduduk untuk mengakses/skill TIK sangat besar sehingga tingkat penggunaannya TIK nya paling tinggi dibanding propinsi lainnya. (4) Prioritas pembangunan ICT di daerah sebaiknya dari propinsi dengan nilai indeks infostate paling kecil yaitu propinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Aceh. (5) Pembangunan infrastruktur ICT di Indonesia

sebaiknya di prioritaskan di daerah Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. (6) Peningkatan skill maupun pendidikan di Indonesia sebaiknya diprioritaskan di propinsi Banten, Kepulauan Bangka Belitung dan Papua. (7) Literasi pengoperasian internet di Papua, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur perlu diprioritaskan karena nilai indeks pengoperasiannya berada pada urutan tiga paling bawah.

### **Pengukuran Tingkat Kualitas Pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi**

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai tingkat kualitas pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi.
- **Hasil penelitian yang didapat** bahwa (1) Tingkat kualitas layanan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi secara umum diperhatikan dari sisi kinerja dan kepentingan/harapan pengguna diperoleh tingkat kesesuaian pada tahap memuaskan baik pada aspek tangibility/berwujud, reliability/kehandalan, responsiveness/ Daya Tanggap, assurance/keyakinan dan empathy/empati. (2) Empat faktor yang menjadi prioritas utama Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam pelaksanaannya dan dinilai sangat penting bagi pengguna, yaitu : pelayanan yang tidak berbelit-belit, pegawai cepat melayani pemohon, pelayanan kepada pemohon secara menyeluruh dan tuntas dan memberikan rasa kepastian terhadap pelayanan. (3) Sebagian besar faktor-faktor layanan yang diberikan oleh Balai Besar Pengujian

Perangkat Telekomunikasi sesuai harapan pengguna, yaitu ada sembilan layanan : peralatan dan perlengkapan pelayanan memadai dan baik; prosedur penerimaan pemohon pengujian yang cepat dan tepat; pelayanan pemeriksaan dokumen yang cepat dan tepat; pelayanan yang ramah serta selalu siap menolong; kemampuan pegawai untuk cepat tanggap menyelesaikan keluhan pemohon; pegawai memberikan informasi yang jelas, mudah dimengerti; pegawai tanggap terhadap masalah yang dihadapi pemohon; pengetahuan dan kemampuan para pegawai yang profesional; dan jaminan keamanan pelayanan dan kepercayaan terhadap pelayanan. (4) Faktor-faktor yang kurang penting atau tidak terlalu penting bagi pengguna, ada tujuh faktor yaitu penataan eksterior dan interior ruang tempat pelayanan pengujian, ketrampilan para pegawai dalam bekerja, memberikan perhatian secara khusus kepada setiap pemohon dan perhatian terhadap keluhan pemohon; kebersihan dan kerapihan ruang tempat pelayanan pengujian, tersedia tempat duduk yang nyaman dan sejuk dan pelayanan yang sopan dan ramah.

## **Studi Potensi Penggunaan Frekuensi Sistem Radio Trunking pada Migrasi Sistem Radio Trunking Digital**

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk melihat potensi frekuensi penggunaan pada radio trunking digital.
- **Hasil penelitian yang didapat** bahwa (1) Dengan melihat analisis Cost-Benefit secara keseluruhan, secara umum migrasi dapat dilakukan pada tahun kapan pun dan imbal hasil proyek masih di atas asumsi OCC (diatas 7%), namun dengan konsekuensi

mundurnya BEP selama 5 tahun baik jika dilakukan di tahun pertama proyek maupun tahun ke 5 proyek, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi utama berikut: a. Jangka waktu proyek adalah 25 tahun; b. Jumlah pelanggan per-site adalah 150; c. Tarif air-time termasuk sewa handset Rp500.000 d. 1 kanal dipakai untuk 50 pengguna dengan mempertimbangkan thumb rue dari Grade of Service percakapan trunking

(2) Ada beberapa alternatif migrasi trunking analog ke digital yaitu: a. Jika pemerintah ingin melakukan migrasi tanpa ada subsidi, langkah yang merupakan jalan tengah adalah migrasi pada tahun ke-5 proyek atau migrasi saat lisensi ISR habis dan digantikan dengan lisensi baru yaitu lisensi ke digital, sehingga pada skenario ini, pemerintah menghentikan izin trunking analog untuk izin selanjutnya; b. Jika pemerintah ingin melakukan migrasi dengan cepat, maka skenario yang mungkin adalah dengan melakukan subsidi pada tahun pertama. Subsidi ini dapat dilakukan dengan Administrative Incentive Pricing atau hasil pelelangan kanal untuk digunakan untuk teknologi lainnya, diberikan kepada operator yang tersingkirkan. (3) Dari data Laporan Kinerja Operas (LKO)i, terdapat beberapa operator yang belum memenuhi kinerja Modern Licensing, sehingga perlunya jalan tengah untuk penegakan aturan terutama komitmen pembangunan serta penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan Modern Licensing. Selain itu, dari LKO dapat dilihat bahwa sebagian operator tidak sehat secara finansial yang dapat dilihat dari jumlah pendapatan pertahun.

Foto SDPPI (konsyoinering II studi pelayanan)



## **Analisis SDM dan Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Wilayah 4 Kota Besar Di Sumatera**

- **Pelaksana** studi ini adalah Puslitbang SDPPI
- **Tujuan** dari Studi ini yaitu untuk mendeskripsikan pemanfaatan perangkat monitor spektrum frekuensi Radio berfungsi secara keseluruhan sesuai dengan harapan, sejalan dengan karakteristik Trend perkembangan pemanfaatan TIK oleh operator maupun masyarakat.
- **Hasil penelitian yang didapat** bahwa (1) Balai kelas II Medan, Loka Padang, Balai Kelas II Pekanbaru dan Balai Monitor Batam telah memadai dari aspek kualifikasi, proporsi dan pengembangan SDM telah memberikan arti yang besar dalam memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan kepatuhan dari pengguna frekuensi radio. Kesiapan SDM dihadapkan pemanfaatan perangkat sistem monitor yang yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. (2) Pelatihan SDM dapat memfungsikan secara keseluruhan elemen-elemen yang ada , sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas secara kontinue. (3) Mendesaknya interaksi dan atau integrasi antara sistem Monitoring dengan sistem Manajemen Sumber daya Frekuensi .. dalam pemanfaatan perangkat Monitor , sumber daya manusia rata-rata masing Fungsi fisik Pemanfaatan perangkat yang berbasis IC lebih panjang umurnya dibandingkan dengan sistem digital, tetapi fiturnya sedikit. (4) Perangkat yang berbasis modul dengan sistem digital masih dalam tahap implementasi. Fungsi fisik Dapat dimanfaatkan bersama-sama dengan perangkat yang sebelumnya, Fungsi proses pengolahan masih tetap dapat terjaga. Fungsi pelaporan dapat dilakukan sesuai tepat waktunya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru telah melaksanakan Program Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tertuang

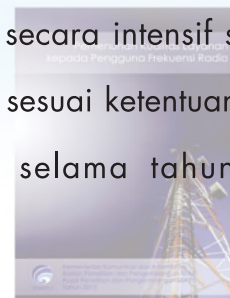
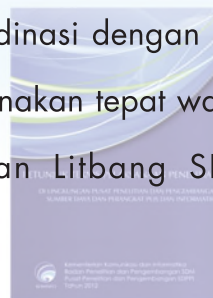
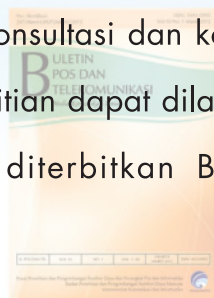
dalam DIPA T.A. 2012, dengan realisasipenyerapan anggaran 83.05 %. Untuk meningkatkan kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan dan pengendalian, Balmon Kelas II Pekanbaru masih membutuhkan penambahan SDM yang sesuai dengan kompetensinya.

## **Pemanfaatan Karya Riset Kelitbangan**

Kegiatan ini dilakukan sebagai wadah untuk menerbitkan dan mempublikasikan hasil karya tulis ilmiah dibidang Komunikasi dan Informatika, terutama dari hasil penelitian unit-unit kerja di Badan Litbang SDM. Pemanfaatan karya riset dilaksanakan melalui:

### **Publikasi Penelitian**

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM mengupayakan pemanfaatan karya riset melalui publikasi dan penerbitan hasil karya tulis dalam berbagai media publikasi seperti jurnal, majalah semi populer, dan buletin. Publikasi ini bertujuan untuk memasyarakatkan hasil penelitian/kajian/telaahan yang dilaksanakan tenaga fungsional peneliti di lingkungan Badan Litbang SDM serta pemerhati di bidang Komunikasi dan Informatika. Selain itu publikasi tersebut juga dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memacu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di lingkungan Badan Litbang SDM Kementerian Koinfo. Beberapa Buletin dan Jurnal yang diterbitkan oleh Badan Litbang SDM telah memperoleh akreditasi dari LIPI dan memiliki ISSN sehingga karya tulis ilmiah yang dimuat dalam Buletin ini akan mendapatkan angka kredit bagi para peneliti dan merupakan salah satu indikator outcome hasil penelitian baik penelitian secara tim maupun secara mandiri. Perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan LIPI secara intensif sehingga terbitan Jurnal Ilmiah Penelitian dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan. Berikut adalah publikasi yang diterbitkan Badan Litbang SDM selama tahun 2013.



Tabel 4 Daftar Publikasi dan Terbitan Badan Litbang SDM Tahun 2013

Judul Publikasi	Unit Penerbit
Buletin Pos dan Telekomunikasi (terakreditasi)	Puslitbang SDPPI
Buletin Acta Diurna	BBPPKI Makassar
Jurnal IPTEK-KOM (terakreditasi)	BPPKI Yogyakarta
Jurnal Bunga Rampai	Puslitbang APTIKA dan IKP
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kominfo (Terakreditasi)	Puslitbang Literasi Profesi
Jurnal Ilmiah Penelitian Bidang Penyelenggaraan dan Pos Informatika	Puslitbang PPI
Jurnal PIKOM	BBPPKI Medan
Jurnal TIK	BBPPKI Medan
Jurnal Ilmiah Pekommas	BBPPKI Makassar
Jurnal Studi Komunikasi dan Media	BPPKI Jakarta
Jurnal Komunikasi	BPPKI Jakarta
Jurnal Komunika	BPPKI Surabaya
Jurnal Ilmiah Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan	BPPKI Banjarmasin
Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik	BPPKI Manado
Majalah Mediakom	Puslitbang APTIKA dan IKP
Majalah Semi Ilmiah Populer Publik	BBPPKI Makassar
Majalah Semi Populer "GAGASAN"	BPPKI Yogyakarta
Majalah Semi Ilmiah Kupas	BPPKI Banjarmasin
Majalah Issue Sentral	BPPKI Surabaya
Majalah Semi Populer Inspirasi	BPPKI Manado
Buku Bunga Rampai: Implementasi USO 2013	BPPKI Yogyakarta

## **Buku Putih / ICT White Paper 2013**



Penyusunan Buku Putih TIK ialah milestone dan outlook pembangunan bidang kominfo serta menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan TIK Indonesia. Buku Putih TIK Kominfo ini telah disusun sejak tahun 2010 dan terus berkelanjutan sampai saat ini. Buku ini memuat tiga bagian besar yakni Tren TIK, Kondisi TIK Saat Ini dan Outlook TIK sebagai gambaran/proyeksi pembangunan TIK di Indonesia, dengan updating data dan penyempurnaan dari buku putih sebelumnya. Untuk tahun 2014, Laporan Khusus membahas mengenai Strategi dan Pengembangan TIK di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia.

Melalui buku putih diharapkan masyarakat bisa mengetahui dan memahami pembangunan TIK yang telah dilakukan dan arah pengembangan serta kebijakan yang diambil, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat, terutama pemangku kepentingan diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan TIK di Indonesia. Harmonisasi dan kerjasama semua pihak merupakan hal yang penting bagi pembangunan TIK di wilayah Indonesia dalam upaya mengefektifkan upaya pembangunan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Perencanaan terpadu dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, serta pemanfaatan dan pemberdayaan TIK diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pemanfaatan TIK secara optimal dan dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.





Buletin Pos dan Telekomunikasi adalah media komunikasi ilmiah yang saat ini dikelola dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Buletin ini pertama kali diterbitkan sejak tahun 2003 dan telah memperoleh akreditasi LIPI dengan Nomor Akreditasi: 247/Akred-LIPI/P2MB/05/2010 dan ISSN: 1693 - 0991. Naskah yang ada dalam Buletin ini berisi karya ilmiah hasil penelitian, studi, analisis data sekunder, pemikiran, review teori/konseptual/metodologi, resensi buku baru dan informasi lain yang berkaitan dengan Pos dan Telekomunikasi. Buletin Pos dan Telekomunikasi juga dapat diakses melalui [bpostel.com](http://bpostel.com).



Jurnal penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi (IPTEK-KOM) diterbitkan oleh Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta, Jurnal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu edisi Juni dan Desember ini dan memuat naskah dari berbagai kalangan yang berfokus pada masalah-masalah komunikasi dan informatika, termasuk kebijakan-kebijakan terkait yang nantinya diharapkan bisa memberi kontribusi nyata dalam rangka pengembangan komunikasi dan informatika di masa mendatang. Jurnal IPTEK-KOM telah memiliki akreditasi LIPI Nomor: 367/AU1/P2MBI/07/2011 dan ISSN: 1410 - 3346.

## Rekomendasi bagi Kebijakan Kementerian Kominfo

Studi tahun 2012 yaitu “Studi Penataan Logical Channel Number (LCN) untuk Siaran Digital Free-To-Air (FTA) di Indonesia” dengan penulis Riza Azmi digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai alokasi Service Information untuk penyelenggaraan televisi digital di Indonesia. LCN sendiri merupakan sumber daya penomoran terbatas yang merupakan nomor identitas Lembaga Siaran pada remote control yang merupakan salah satu fitur DVB-T2. Adapun dari hasil kajian tersebut disebutkan beberapa opsi dalam pengaturan Service Information terutama Logical Channel Number (LCN) yaitu opsi diatur berdasarkan genre, opsi diatur berdasarkan pengelompokan penyelenggara, opsi first-come first-serve dan opsi berdasarkan penetapan alokasi. Pada rancangan Keputusan Menteri tersebut, disepakati bahwa Indonesia mengambil opsi pengaturan LCN berdasarkan alokasi digit sesuai dengan urutan pemenang seleksi Muxer, sementara untuk alokasi tambahan menggunakan mekanisme first-come first-serve dan alokasi untuk nomor remote 1 – 9 akan dilakukan ditentukan kemudian seperti lelang.



*Kegiatan Litprof 2013*



## Pengembangan SDM

Tabel 5 Indikator Kinerja Badan Litbang Tahun 2013-Sasaran Strategis 2

<b>Sasaran Strategis 2</b>			
Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika (M4.S4.2)			
Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifikasi	60% dari 1.404 peserta	1.927 orang dari 2.701 peserta	113.61
Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo	5.000 Orang	6.526 Orang	130.52
Jumlah Peserta Diklat Multi Media	1.599 Orang	1.595 Orang	99.74

Badan Litbang SDM melaksanakan penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang Komunikasi dan Informatika melalui berbagai program dan kegiatan Pengembangan SDM. Berdasarkan Tabel 5 di atas, Badan Litbang berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2013. Berikut adalah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan:

### Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri



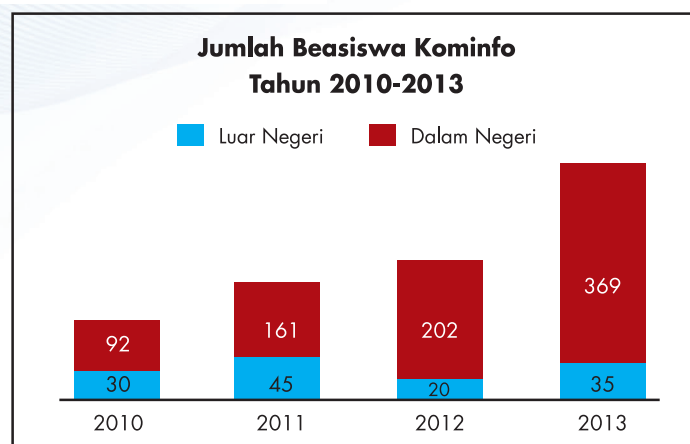
Program Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri merupakan salah satu program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan kapabilitas dan daya saing SDM Indonesia di bidang komunikasi dan informatika sehingga dapat berperan sebagai agen-agen perubahan sosial di lingkungan masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Kominfo dan visi Indonesia sebagai ASEAN ICT Leading Nation pada tahun 2015.

Pada tahun 2013, Badan Litbang SDM memberikan 35 beasiswa S2 Luar Negeri dan 369 beasiswa S2 Dalam Negeri kepada para PNS, karyawan BUMN/BUMD dan Industri TIK, dengan jurusan bidang studi komunikasi dan informatika. Beasiswa dalam negeri diberikan untuk jurusan CIO dan Ilmu Komunikasi bekerjasama dengan ITS, UI, UGM, ITB, UNP, Universitas Hasanuddin, USU, Universitas Andalas, Universitas Sebelas Maret, Universitas Airlangga, dan Universitas Syiah Kuala sedangkan beasiswa luar negeri diberikan untuk jurusan informatika dan bidang terkait TIK di beberapa negara yaitu Australia, Belanda, Inggris, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, dalam meningkatkan kontribusi para penerima beasiswa kepada dunia akademis dan masyarakat, pada bulan November Badan Litbang SDM juga mengadakan Seminar Temu Alumni ke-4 Alumni Beasiswa di Padang, dimana para alumni diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah mereka.



Gambar 4  
Pre-Departure Briefing  
Beasiswa

Grafik 3  
Perkembangan Jumlah  
Beasiswa Kominfo  
Tahun 2010-2013



## Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Chief Information Office



Gambar 5 Bimtek dan Sertifikasi GCIO di Purwokerto (atas) dan Mataram (bawah)

Pelatihan CIO merupakan bagian dari usaha peningkatan literasi masyarakat melalui upaya peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan, pengendalian operasional serta evaluasi di bidang pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan E-Government, Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007, tentang Panduan Tata Kelola TIK.

Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan CIO sejak tahun 2010 dimana dalam setiap kegiatan diikuti dengan Ujian Sertifikasi. Pada tahun 2013, Badan Litbang SDM telah memberikan pelatihan CIO kepada 736 peserta di 13 lokasi dimana 381 orang diantaranya lulus pada ujian sertifikasi.

## **Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi**



*Gambar 6 Bimtek Budaya Dokumentasi*

Bimbingan Teknis Budaya Dokumentasi merupakan pelatihan yang ditujukan untuk memberikan kompetensi dasar atau kompetensi minimal kepada aparatur pemerintah di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan memanfaatkan TIK dan membantu penyediaan calon-calon pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di seluruh Indonesia sesuai dengan telah diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sejak Mei 2010. Sesuai arah kebijakan pemerintah dan target yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setiap kegiatan bimtek ini diakhiri dengan uji kompetensi dan sertifikasi. Selama tahun 2013, Badan Litbang SDM telah memberikan bimbingan teknis Budaya Dokumentasi kepada 648 peserta di 10 lokasi dengan 442 lulus dalam ujian sertifikasi.

## Pelatihan Komunikasi Publik

Dalam meningkatkan e-literasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan internet, Badan Litbang SDM mengadakan berbagai kegiatan komunikasi publik diantaranya *ominfo Goes to Mall*, Bimtek Literasi TIK untuk UMKM dan Bimtek Literasi untuk Perempuan. Peserta berasal dari perangkat desa, pelajar SMA, pesantren dan mahasiswa, pengusaha dan karyawan UMKM serta ibu rumah tangga. Selama 2013, pelatihan diselenggarakan di lima kota yaitu Medan, Bogor, Padang, Kuningan, dan Malang dengan total peserta sebanyak 508 orang.

Gambar 7 Kominfo Goes to Mall Malang 2013



## Sertifikasi Nasional dan Internasional

Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang kominfo, khususnya dalam Rencana Aksi Perluasan dan Penciptaan Lapangan Kerja bagi angkatan kerja muda, Badan Litbang SDM memfasilitasi sertifikasi nasional berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta sertifikasi internasional *Systems Security Certified Practitioner (SSCP)*. Fasilitas Sertifikasi SSCP diberikan kepada praktisi muda bidang keamanan informasi dan dilaksanakan sebanyak dua kali dengan jumlah peserta lulus sebanyak 10 orang. Fasilitas Sertifikasi Nasional terdiri dari Sertifikasi CIO dan Budaya Dokumentasi yang diadakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis, serta sertifikasi lainnya yang dilaksanakan di 9 kota dengan jumlah kelulusan 483 dari 513 peserta. Selain itu, Badan Litbang SDM juga melaksanakan sertifikasi profesi seperti Sertifikasi Mikrotik, Sertifikasi Pelatihan Esensi Computer dan Sertifikasi Interactive Multimedia for Teacher dengan total kelulusan 250 dari 360 peserta.

### Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Badan Litbang SDM juga berupaya mengembangkan SDM bidang Kominfo melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Kominfo. SKKNI merupakan standar kompetensi yang wajib dimiliki setiap pekerja bidang Kominfo di Indonesia. Selama tahun 2013, Badan Litbang SDM melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi telah menyusun tiga Rancangan SKKNI Bidang Kominfo yaitu RSKKNI Layanan Pos, Penyiaran, dan ICT Project Management.

*Kegiatan LITPROF SKKN 1 /Sertifikasi*





## Pelatihan TIK di BPPTIK Bekasi dan BPRTIK (PUSTIKAS) Ciputat

Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK (BPPTIK) Bekasi dan Balai Pelatihan dan Riset TIK Ciputat merupakan unit pelaksana teknis Badan Litbang SDM yang bertugas memberikan pelatihan di bidang Koinfo kepada pekerja, masyarakat, dan aparatur pemerintah. Berbagai pelatihan dilaksanakan diantaranya Pelatihan Jaringan dan Keamanan Komputer, Desain Grafis, Programmer, Multimedia dan lain-lain oleh kedua balai bekerja sama dengan satuan kerja internal Kementerian Koinfo dan institusi eksternal Koinfo seperti Pemerintah Daerah, universitas, sekolah, asosiasi industry dan perusahaan. Selain pelatihan, BPPTIK dan BPRTIK juga menyelenggarakan seminar dan workshop bertema Internet Sehat dan Aman, serta computer-based training. Selama 2013, 1.097 peserta telah mengikuti pelatihan di BPPTIK Bekasi dan 3.514 peserta di BPRTIK Ciputat. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2013 dikarenakan berbagai kerjasama yang dilakukan dengan berbagai institusi terkait.

Gambar 8. BPPTIK Cikarang dan Kegiatan Pelatihan



## Bab II

Gambar 9. BPRTIK/PUSTIKNAS Ciputat dan Kegiatan Pelatihan





## Permasalahan dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang baik secara administrasi, teknis maupun pembiayaan diantaranya:

Tabel 6 Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan 2013	Tindak Lanjut 2014
<b>Sumber Daya Manusia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di lingkungan Badan Litbang SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Bezzeting dan Beban Kerja untuk pengajuan pegawai baru untuk tahun 2014 kepada Biro Kepegawaian</li> <li>Realokasi pegawai sesuai bidang keahlian dan kebutuhan unit kerja</li> </ul>
<b>Pengukuran Indikator Kinerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulitnya mengukur kinerja Pemanfaatan Karya Riset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkonsultasi dengan Biro Perencanaan untuk pengukuran di tahun berikutnya.</li> </ul>
<b>Publikasi Jurnal, Buletin, dan Majalah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya waktu terbit dan proses naskah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat timeline kegiatan penerbitan dan optimalisasi publikasi online</li> </ul>
<b>Wilayah Kerja UPT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inefisiensi sumber daya dan ketidakterjangkauan wilayah kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mereviu kembali wilayah kerja UPT</li> </ul>
<b>Kelembagaan MMTC Yogyakarta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status Diklat Ahli Multimedia MMTC Yogyakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direncanakan menjadi Sekolah Tinggi</li> </ul>
<b>PNBP BPPTIK Bekasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izin PNBP BPPTIK Bekasi belum disetujui terkendala birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengusahakan percepatan izin</li> </ul>





# Bab III

Penutup

## Bab III Penutup

---

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika selama tahun 2013 berjalan baik meskipun terdapat berbagai hambatan dan permasalahan yang timbul. Berikut hal-hal pembelajaran yang dapat diperoleh Badan Litbang SDM selama Tahun Anggaran 2013 berlangsung:

1. Capaian Kinerja Keuangan Badan Litbang SDM pada tahun 2013 adalah sebesar 96,40% yang merupakan kontribusi dari satuan kerja-satuan kerja yang ada dalam koordinasi Badan Litbang SDM. Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan, mengharuskan setiap satuan kerja untuk melakukan penyesuaian kegiatan serta perencanaan ulang, yang akhirnya membuat pemanfaatan anggaran juga kurang optimal.
2. Penetapan capaian kinerja kedepan agar memperhatikan kemampuan anggaran dan melakukan prediksi terjadinya efisiensi anggaran.
3. Mengupayakan tidak melakukan efisiensi/pemotongan anggaran terhadap kegiatan yang termasuk dalam penetapan kinerja.
4. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan agar dalam efisiensi anggaran Badan Litbang SDM diberikan perhatian khusus (% pemotongan tidak disamakan dengan Direktorat Operasional) karena hampir semua kegiatan Badan Litbang SDM masuk dalam penetapan kinerja Badan Litbang bahkan beberapa masuk dalam target prioritas bidang dalam RPJMN.



5. Mengupayakan persetujuan penerimaan PNBK pada BPPTIK Bekasi sehingga target jumlah peserta pelatihan/paket pelatihan yang dilaksanakan dapat ditingkatkan.
6. Melakukan perubahan terhadap sistem/pola/mechanisme penerimaan calon penerima beasiswa, penerimaan mahasiswa S2 diarahkan pada S2 Dalam Negeri sehingga memungkinkan penambahan jumlah penerima mahasiswa, meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan program S2, meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi TPA di daerah, serta menyempurnakan sistem pembiayaan.

# Lampiran-Lampiran

Penetapan Kinerja Badan Litbang dan Capaian Tahun 2013

Daftar Judul Penelitian Badan Litbang SDM Tahun 2013

## DAFTAR JUDUL PENELITIAN BADAN LITBANG SDM TAHUN 2013

### JENIS PENELITIAN

### JUDUL PENELITIAN

#### Puslitbang Aptika-IKP

- Penelitian Kelompok
1. Kajian Kebijakan dan Kelembagaan APTIKA Terhadap Regulasi ITE
  2. Kajian Pengaruh Investasi ICT Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
  3. Studi Pengembangan Desa Informasi Berbasis TIK di Wilayah Perbatasan.
  4. Penelitian Pengembangan Media Pertunjukan Rakyat Dalam Mendukung Komunikasi Publik.
  5. Penelitian Pemanfaatan Aplikasi TIK dan Implementasi Media Center di Lembaga Pemerintah Daerah.

#### Puslitbang Literasi & Profesi

- Penelitian Kelompok
1. Penelitian Literasi TIK Masyarakat
  2. Penelitian tentang Supply Demand SDM Profesi bidang Kominfo
  3. Studi Pengembangan Sistem Pelatihan berbasis Kompetensi untuk Aparat Pemerintah bidang Kominfo
  4. Studi Pengembangan SDM Wirausaha bidang Kominfo

- Penelitian Mandiri
1. Kajian Kelembagaan Badan Litbang Sumber Daya Manusia
  2. Konsumsi Berita Lintas Media Tradisional dan Media Baru bagi warga Kota (Studi Konsumsi Media di Kota Bandung).
  3. Internet Sebagai Stimulan Pembentukan Sikap Produktif Menuju Masyarakat Desa Informasi.
  4. Penerimaan Masyarakat terhadap Implementasi E-Government di Kabupaten Sragen.
  5. Strategi Komunikasi dan Pemanfaatan Media dalam mengakselerasi Masyarakat Informasi (Studi fenomenologi bagi pengelola dan pelayan informasi public di kota Bandung)
  6. Penelitian Output Peningkatan SDM TIK pada Balai Pelatihan di Semarang
  7. Membangun Konten Digital Ensiklopedi Media untuk Program USO Sebagai Alternatif solusi penunjang fungsi Government Public Relations Kementerian Kominfo.

### **Puslitbang SDPPI**

- Penelitian Kelompok
1. Studi Kualitas Pelayanan Internal Direktorat Jenderal SDPPI (swakelola)
  2. Studi Pemanfaatan Digital Dividend untuk Layanan Long Term Evolution (LTE) (swakelola)
  3. Studi Kesiapan Direktorat Standardisasi dalam Menerapkan ISO/IEC Guide 17065 (swakelola)
  4. Studi Potensi Pasar Sekunder Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia (kontraktual)

Penelitian Mandiri

1. Evaluasi Penyelenggaraan Radio Trunking Terrestrial di Indonesia
2. Studi Potensi Penggunaan Frekuensi Sistem Radio Trunking Pada Migrasi Sistem Radio Trunking Digital
3. Studi Perencanaan Migrasi Sistem Radio Trunking Digital
4. Pengelolaan Sampah Satelit di Indonesia
5. Studi pengukuran Digital Divide di Indonesia
6. Studi Kualitas Pelayanan Publik Dalam Menunjang Pengembangan Internet
7. Analisis Kualitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Radio Siaran Dengan metode Importance Performance Analisis (IPA)
8. Pengukuran Tingkat kualitas pelayanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi
9. Kualitas Layanan Jasa Akses Internet Broadband Pada Jaringan Tetap di Indonesia
10. Evaluasi Kepuasan Pengguna Terhadap Kualitas Layanan Data Pada smartphone di Wilayah DKI Jakarta
11. Koordinasi Pemanfaatan Sistem Monitoring untuk Pengendalian Sumber daya Spektrum Frekuensi Radio

## **Puslitbang PPI**

- Penelitian Kelompok
1. Studi Evaluatif Tata Kelola Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Sebagai Model Layanan Akses Informasi Masyarakat Kecamatan
  2. Model Layanan Tata Kelola PLIK di Indonesia sebagai Akses Informasi Bagi Pemberdayaan Masyarakat
  3. Studi Tingkat Kematangan (Maturity) Smart City di Indonesia
- Penelitian Mandiri
1. Preferensi Konsumen Terhadap Jasa Perposan Survei di Kota Bandung
  2. Komunikasi Organisasi PT. POS Indonesia di Kota Medan
  3. Studi Penggunaan Layanan Jasa Pengiriman Oleh Pelaku Bisnis
  4. Analisis Success Factor Dalam Penerimaan dan Pemanfaatan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) PT. Pos

## **BBPPKI Medan**

- Penelitian Kelompok
1. **Penelitian Pengembangan Media Pertunjukan Rakyat dalam Mendorong Komunikasi Publik**
  2. **Penelitian Indikator Survei Akses dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Sektor Rumah Tangga dan Individu Tahun 2013**

Penelitian Mandiri

1. Pemanfaatan Kompang sebagai Media Penyampaian Informasi Publik di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
2. Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
3. Analisis Strategi Pengembangan Sistem Teknologi Informasi pada Penerapan Electronic Government
4. Analisis Interaktivitas Website Pemerintah Daerah (Studi Fitur Website Pemerintah Kota Bukittinggi)
5. Pemanfaatan Media dalam Memperoleh Informasi Publik Melalui Program Desa Informasi
6. Analisis Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan Standar SNI ISO/ IEC 27001 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
7. Peran Media Komunitas dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak
8. Analisis Penerimaan Teknologi dalam Mendukung Implementasi Electronic Government oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
9. Penggunaan Smartphone dalam Mendukung Prestasi Belajar Anak
10. Studi Kasus Pembangunan dan Pengembangan Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kabupaten Simeulue
11. Efektivitas Pemanfaatan Layanan MPLIK di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

12. Analisa Keberadaan LPP RRI Entikong dalam Penyebaran Informasi Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Bangsa di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
13. Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menciptakan Integrasi Sosial di Kota Tarakan Kalimantan Timur
14. Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah di Samarinda Kalimantan Timur
15. Pemanfaatan Taman Internet Sebagai Ruang Publik bagi Masyarakat di Kota Batam
16. Pengaruh Kemampuan Teknis Mengakses dalam Menggunakan Internet Sehat pada Kalangan Pelajar SLTP di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara
17. Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan BBPPKI Medan berbasis Web

### **BBPPKI Makassar**

- Penelitian Kelompok
1. Pemetaan Database Bidang Komunikasi dan Informatika wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara
  2. Manajemen Pengelolaan MPLIK di Sulawesi Selatan
  3. Survey Akses dan Penggunaan TIK di Rumah Tangga dan Individu di Wilayah Kerja BBPPKI Makassar
  4. Survei Literasi TIK Masyarakat dan Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Informasi di wilayah kerja BBPPKI Makassar

## Penelitian Mandiri

1. Pemanfaatan MPLIK Sebagai Media Pembelajaran di Kabupaten Pinrang
2. Dampak Internet Terhadap Anak Sekolah Dasar di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan
3. Potensi Media Pertunjukan Rakyat Sebagai Media Penyebaran Informasi di Era Teknologi Komunikasi dan Informasi
4. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Berbasis Elektronik (Kasus: Kabupaten Maros)
5. Analisis Isi Editorial di Harian Media Indonesia, Fajar dan Tribun Timur
6. Motif Penggunaan Internet di Kalangan Remaja
7. Pemanfaatan Bandwidth Sewa Internet oleh Instansi Pemerintah Kota Makassar
8. Pemingkatan e-Government di Kota Makassar
9. Tingkat Kesadaran Keamanan Informasi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil
10. Model Implementasi Green ICT Pada Lingkup Pemkot Parepare

## **BPPKI Jakarta**

### Penelitian Kelompok

1. Penelitian Pola Penggunaan TIK Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pedesaan
2. Penelitian Evaluasi Pemanfaatan Pusat Layanan Informasi Kecamatan (PLIK)
3. Penelitian Kajian Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika



- Penelitian Mandiri
1. Penelitian Diskursus Media dan Persepsi Masyarakat Tentang Isu Terorisme di Indonesia
  2. Penelitian Ideologi Pemilik Akun di balik Teks Nasionalisme (Analisis wacana kritis Fairclough Terhadap Teks dalam situs Jejaring Sosial)
  3. Penelitian Pemberitaan Tentang Banjir di DKI Jakarta Melalui Media Online (Analisis Isi pada Situs detik.com)

### **BPPKI Bandung**

- Penelitian Kelompok
1. Prospek Penyiaran TV di Indonesia Terkait Digitalisasi Sistem Siaran TV
  2. Survey Indikator Bidang Kominfo

- Penelitian Mandiri
1. Peran Pemberitaan Pemilihan Gubernur Jabar 2013 di Media Online Dalam Membentuk Opini Mahasiswa
  2. Pengembangan TIK Dalam Mewujudkan Jabar Cyber Province Sebagai Media Komunikasi dan Informasi Pemerintahan Kota Sukabumi
  3. Literasi Internet Pada Siswa SLTP (Studi Deskriptif Literasi Internet Pada Siswa SLTP di Kabupaten Purwakarta)
  4. Pengembangan Website Sebagai Media Sosial Menuju Good Governance Pada Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
  5. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Tantangan, dan Peluang Pembangunan TIK

6. Apresiasi Masyarakat Terhadap Pers Berbahasa Sunda
7. Pemanfaatan Handphone Pada Masyarakat Perdesaan
8. Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik Pada Bagian Humas Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya
9. Evaluasi Kebijakan Penyediaan Fasilitas USO Program MPLIK di Kabupaten Kuningan Jawa Barat
10. Persepsi Pengelola Radio Komunitas Tentang Siaran Kearifan Lokal di Kabupaten Sumedang

### **BPPKI Yogyakarta**

- Penelitian Kelompok
1. Penggunaan Internet di Kalangan Masyarakat (Survey pada Daerah Lokasi MPLIK di DIY)
  2. Survey Akses dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Rumah Tangga dan Individu Indonesia Tahun 2013

## BPPKI Surabaya

- Penelitian Kelompok
1. Penelitian Pendapat Masyarakat Tentang Kantor Pos di Era TI
  2. Penelitian Apresiasi Masyarakat Terhadap Program Internet Sehat
  3. Kajian Indikator Bidang Kominfo
  4. Penelitian Pemanfaatan Internet Sebagai Internet Marketing Untuk mengiklankan Produk UKM
- Penelitian Mandiri
1. Penelitian Tingkat e-Literacy TIK Pada Siswa SMP Negeri di Kota Jember
  2. Penelitian Pelaksanaan e-Government Sebagai Pelaksanaan Peningkatan Sosial ekonomi Masyarakat di Kota Malang
  3. Peran Telecenter Dorogati Kota Malang Dalam meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar
  4. Penelitian Pemanfaatan pusat Layanan Oleh Masyarakat di Kab.Trenggalek
  5. Penelitian Apresiasi siswa SMA Mojokerto Terhadap Isi Siaran Edukasi
  6. Penelitian Kekuatan facebook Sebagai media Kampenye Politik bagi Pemilih Pemula
  7. Penelitian Penerapan FOS di Instansi Pemerintah Kota Madiun
  8. Penelitian Penerapan Keamanan Informasi Pada Aplikasi E-Government

## **BPPKI Banjarmasin**

- Penelitian Kelompok
1. Penelitian Kesiapan Masyarakat Menerima Konversi Televisi Analog ke Televisi Digital
  2. Penelitian Pemanfaatan MPLIK dalam Peningkatan Pengetahuan Masyarakat
  3. Penelitian Survey Akses dan Penggunaan TIK pada Sektor Rumah Tangga dan Individu
- Penelitian Mandiri
1. Penelitian Pengembangan Media Pertunjukan Rakyat dalam Mendukung Komunikasi Publik
  2. Penelitian Apresiasi masyarakat terhadap Konten Muatan Lokal di Televisi
  3. Penelitian Persepsi Masyarakat terhadap Peran Kominfo Mengenai UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ
  4. Penelitian Pemanfaatan Situs Jejaring Sosial sebagai Sarana Komunikasi Massa
  5. Penelitian Apresiasi Masyarakat terhadap Keberadaan Warnet

## **BPPKI Manado**

- Penelitian Kelompok
1. Penelitian Pemanfaatan TIK bagi Masyarakat Ekonomi Bahari (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan di Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo)
  2. Evaluasi Implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan di Provinsi Gorontalo
  3. Survey Akses dan Penggunaan TIK Pada Sektor Rumah Tangga dan Individu
- Penelitian Mandiri
1. Studi Kebutuhan Informasi Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaud.
  2. Persepsi Masyarakat Terhadap Quality of Service Jaringan Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
  3. Studi Pemanfaatan Media Pada Masyarakat Kabupaten Sitaro.

## PENETAPAN KINERJA BADAN LITBANG DAN CAPAIAN TAHUN 2013

<b>Sasaran Strategis 1</b>			
<b>Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika (M4.S4.1)</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
Jumlah karya litbang yang dipublikasikan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
Jumlah dokumen makalah kebijakan kajian kebijakan bidang komunikasi dan informatika	4 Laporan	4 Laporan	100 %

## PENETAPAN KINERJA BADAN LITBANG DAN CAPAIAN TAHUN 2013

<b>Sasaran Strategis 2</b>			
<b>Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika (M4.S4.2)</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
Prosentase peserta pendidikan dan pelatihan yang tersertifikasi	60% dari 1.404 Orang	1.927 Orang dari 2.701	113.61%
Jumlah peserta Diklat Literasi Kominfo	5.000 Orang	6.526 Orang	130.52%
Jumlah peserta Diklat Multi Media	1.599 Orang	1.592 Orang	99.56%
<b>Rata - rata capaian kinerja</b>			<b>108.73%</b>

# Personil

---

## Pejabat Struktural



**Basuki Yusuf Iskandar**  
Kepala Badan Litbang SDM



**Sri Cahaya Khoironi**  
Sekretaris Badan  
Litbang SDM



**Sunarno**  
Kepala Puslitbang SDPPI



**Siti Meiningsih**  
Kepala Puslitbang PPI



**Gati Gayatri**  
Kepala Puslitbang Literasi  
dan Profesi



**Wiryanta**  
Kepala Puslitbang APTIKA  
dan IKP

# Kontak

---

## Laporan Tahunan 2013

### Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9

Jakarta Pusat 10110

Tel +62 21 381 0678

Fax +62 21 381 0678

<http://balitbang.kominfo.go.id>

